



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2018-2019  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;  
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas;  
Dengan : 3. Gubernur Bank Indonesia;  
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK);  
5. Badan Pusat Statistik (BPS).  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Kamis, 13 Juni 2019  
Waktu : 14.00 WIB s.d 18.13 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI  
Ketua Rapat : Melchias Markus Mekeng  
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono  
Acara : Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2020  
Hadir : **PEMERINTAH:**  
1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;  
2. MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
3. GUBERNUR BANK INDONESIA;  
4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK);  
5. BADAN PUSAT STATISTIK (BPS).

**JALANNY RAPAT:**

**KETUA RAPAT (MELCHIAS MARKUS MEKENG/F-PG):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,  
Yang terhormat saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya,  
Yang terhormat saudara Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya,  
Yang terhormat saudara Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan beserta jajarannya,  
Yang terhormat saudara Kepala BPS beserta jajarannya,  
Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,  
Serta hadirin yang berbahagia.**

Menurut catatan yang ada di kami terima dari Sekretariat daftar hadir telah ditandatangani oleh 14 Anggota dari 8 Fraksi dan ijin 1 orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijinilah kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPS dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)**

Sebelum kita memulai Rapat Kerja ini, ijinlah saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijria, *minal aidzin walfaidzin* mohon maaf lahir dan bathin.

Mengawali Rapat Kerja pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah dan karunia-Nya kita dapat menghadiri Rapat Kerja pada siang hari ini.

Agenda Rapat Kerja kita pada hari ini adalah pembahasan asumsi dasar dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2020.

**Hadirin yang kami hormati.**

Sebagaimana kita ketahui Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 20 Mei 2019, Pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020. Penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tersebut merupakan amanat Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

Asumsi dasar ekonomi makro yang disampaikan oleh Pemerintah dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% sampai 5,6%.

2. Inflasi 2,0% sampai 4,0%.
3. Suku bunga SPN 3 bulan 5% sampai 5,6%.
4. Nilai Tukar Rupiah Rp14.000 sampai Rp15.000. per Dolar AS.

Oleh karena itu, pada kesempatan Rapat Kerja sore hari ini, Komisi XI DPR RI ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait asumsi makro tersebut di atas.

Untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada saudara Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, serta Kepala BPS untuk menyampaikan pemaparannya.

Kami persilakan Ibu Menteri.

### **MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

### **Pimpinan dan Anggota Km XI DPR RI yang kami hormati.**

Kami akan menyampaikan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020. Beberapa pandangan maupun presentasi telah kami sampaikan melalui DPR RI di dalam Rapat Paripurna maupun di dalam Badan Anggaran. Jadi di dalam hal ini mungkin kami akan cukup mengakselerasi presentasi, namun tetap substansinya akan kami pertahankan.

Pertama, di dalam rangka untuk mendesain kebijakan APBN Tahun 2020 tema diangkat untuk tahun 2020 adalah bagaimana APBN menjadi instrument untuk mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusi. Ini berkaitan dengan visi Indonesia 2045 yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden di dalam Musrenbang maupun di dalam Bappenas yang telah menyampaikan bagaimana *outlook* dan proyeksi Indonesia hingga tahun 2045.

Instrument APBN di dalam rangka untuk mendorong daya saing maupun peningkatan kualitas SDM akan difokuskan kepada bagaimana kita tetap menjaga perbaikan dan pembangunan infrastuktur, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memperbaiki kualitas birokrasi di dalam pelayanan maupun efisiensi kerja, menggunakan katalis dari APBN di dalam rangka untuk pengayaan inovasi dan teknologi dan bagaimana kita bisa mengatur tata ruang Indonesia agar semakin terintegrasi. Tentu dengan menjaga agar APBN tetap sehat dan kredible di dalam jangka menengah panjang.

Di dalam mendongkrak daya saing kalau kita lihat bagaimana kondisi Indonesia dibandingkan beberapa negara, faktor apa yang bisa menetapkan peningkatan daya saing Indonesia kita lihat di dalam *spiderweb* yang sebelah kanan menggambarkan bahwa fokus Indonesia adalah bagaimana kita bisa mengejar di bidang *inovation capability*, infrastruktur, ICT adoption, di bidang kesehatan, *skill* dan *financial system* terutama nanti terhubungan dengan pendalaman sektor keuangan.

Tantangan pembangunan kita di dalam rangka untuk menghindari *middle income trap* dan dalam rangka untuk mencapai visi 2045 adalah bagaimana kita mengaddress issue mengenai daya saing produktifitas dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dikaitkan dengan kondisi di mana perekonomian kita dari sisi *supplay* dan *demand* kita telah beroperasi pada tingkat dimana *output gap* sudah semakin kecil, berarti kapasitas maksimal telah digunakan.

Oleh karena itu, di dalam rangka untuk bisa mengelola permintaan yang akan terus meningkat maka kita perlu untuk melakukan berbagai kebijakan di dalam rangka untuk menyelesaikan atau menangani masalah-masalah structural untuk bisa meningkatkan level output potensial. Bagaimana dari sisi daya saing dari sisi reformasi structural yang berhubungan dengan perbaikan investasi dan perbaikan produktifitas. Ini adalah *policy* yang meng-*address issue* sisi *supplay*.

Dari sisi demografi dan dari sisi distribusi penduduk kita melihat fenomena *aging population* meskipun saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi, namun kita sudah bisa melakukan proyeksi tahun 2030 jumlah penduduk usia di atas 60 tahun akan meningkat dari 70% menjadi 13%. Urbanisasi merupakan satu fenomena yang akan terus terjadi, apakah masyarakat pindah dari desa kepedesaan atau dari sisi konversi dari kondisi perkotaan sehingga dia semakin *organize*. Ini akan menjadi tantantangan dari sisi ketahanan pangan maupun dari sisi ketersediaan infrastruktur.

Kemudian dengan peningkatan *income* perkapita Indonesia dengan *income* perkapita yang semakin meningkat dan penduduknya yang semakin besar, memiliki konsekuensi munculnya *middle class* yang semakin besar. Ini tentu akan menimbulkan dampak terhadap pola permintaan barang dan jasa dan mobilitas masyarakat kita. Namun kita dari sisi kependudukan juga menghadapi masalah *skill* adikusi, dimana 59 tenaga kerja kita masih berpendidikan di bawah SMP dengan *skill* yang tidak memadai untuk pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang semakin meningkat.

Dari sisi distribusi Indonesia perekonomiannya maupun berbagai kegiatan-kegiatan masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Dilihat dari jumlah penduduk 149 atau hampir 150 juta tinggal di Pulau Jawa dengan pendapatan perkapita pertumbuhan maupun tingkat kemiskinan terlihat di dalam table ini. Dengan konsentrasi untuk GDP masih juga cukup besar berasal dari Pulau Jawa. Sementara pulau-pulau lain selain penduduknya lebih kecil juga dari sisi kontribusi dan diversifikasi ekonominya masih sangat terbatas. Ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekonominya melalui pemerataan kemajuan di berbagai pulau-pulau diluar Pulau Jawa.

Dan tantantangan untuk menghindarkan Indonesia dari *middle income trap* maupun di dalam menghadapi era distrisi 4.0 adalah bagaimana kita mampu untuk terus meningkatkan fokus di dalam produktifitas kemampuan untuk meng-*absorb* teknologi dan mengkonversinya dan kondisi pasar tenaga kerja yang harus semakin kondusif dicirikan dengan kenaikan produktifitas. Hal ini tentu akan menjadi faktor pendorong bagi tingkat investasi yang tinggi dan berkelanjutan. Agar Indonesia mampu meningkat dari *middle income* menjadi *high income country*, maka kita perlu untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita terus dirata-rata 6% mendekati 6 sampai dengan periode 2030.

Untuk perubahan structural dan industrial 4.0 seperti kita ketahui bahwa dari kontribusi sectoral di Indonesia semenjak krisis 1997-1998 kontribusi sektor manufaktur bukannya meningkat tetapi justru mengalami penurunan. Hal ini juga sejalan dengan semakin tingginya sektor jasa, namun di Indonesia muncul dan meningkatnya kontribusi sektor jasa tidak identik dengan *high value edit* sektor *services*, sehingga menimbulkan dampak munculnya sektor informal dan *lobbying jobs* di sektor *services*. Indonesia harus semakin meningkatkan kemampuan untuk mencegah *the industrialisasi* dan meningkatkan sektor manufaktur melalui kebijakan investasi dan kebijakan peningkatan daya kompetisi Indonesia. Itu adalah *environment* maupun visi yang kita ingin capai dengan menggunakan salah satunya instrument fiskal yang cukup menurun.

Kami akan masuk kepada lingkungan global dan perekonomian Indonesia yang akan sangat menentukan sebagai landasan kita menentukan asumsi dasar bagi RAPBN 2020. Di lihat dari perekonomian dunia, kita melihat aktifitas ekonomi real mengalami pelemahan. Ini diakibatkan adanya tensi perdagangan perang dagang antara Amerika dengan partner-partner dagangnya yang telah menimbulkan dampak negative terutama pada akhir tahun 2018 dan sekarang masih mengalami eskalasi. Di lihat dari berbagai indikator disana terlihat bahwa dari indeks perdagangan maupun manufaktur global, indeks PMI di negara-negara maju semuanya dalam tren menuju ke bawah terutama terjadi pada akhir tahun 2018 dan sekarang ini masih tetap berlangsung.

Kalau kita lihat dengan ketidakpastian global yang meningkat dan ini telah menyebabkan beberapa instansi internasional telah melakukan revisi dari proyeksi ekonomi global. Kalau kita lihat di dalam table ini IMF di dalam membuat proyeksi ekonomi tahun 2019 saja waktu bulan Oktober 2018 mereka menyampaikan bahwa *gross* untuk ekonomi dunia tahun 2019 diperkirakan 3,7 dan waktu itu bahkan masih mengatakan *recovery* ekonomi secara global adalah *broadwest*. Namun begitu masuk bulan Januari 2019 sudah terjadi revisi ke bawah dari proyeksi ekonomi dunia dari 3,7 menjadi 3,5. Dan sekarang bulan April yang lalu IMF telah menurunkan proyeksinya untuk pertumbuhan ekonomi dunia menjadi hanya 3,3%.

Kami kemarin menyampaikan bahwa bank dunia juga melakukan *update* revisi untuk tahun 2019 adalah sebesar 2,6% atau terjadi penurunan sebesar 0,5% semenjak proyeksi ekonomi tahun 2019. Ini menggambarkan bahwa resiko untuk tahun 2019 telah ter-matrilies atau sudah terjadi *down site risk* akibat adanya perang dagang tersebut.

Ada faktor-faktor lain yang juga memberikan kontribusi negative terhadap kondisi ekonomi dunia seperti kondisi Brexit yang masih terus tidak berkepastian. Kemudian ada fluktuasi harga minyak dan harga komoditas. Kondisi geopolitik yang juga mengalami tensi dan juga moderasi pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Kami kemarin baru saja menghadiri pertemuan G20 dan ini masih terkonfirmasi faktor-faktor yang merupakan *down site risk* ini masih cukup terlihat di dalam interaksi di antara para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di G20.

Dengan situasi tersebut kalau kita lihat APBN Tahun 2019 ini, maka asumsi makro yang kita gunakan di dalam APBN 2019 pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami tekanan sehingga terjadi *down site risk*. Inflasi barangkali masih akan tetap sama, kurs dengan asumsi Rp15.000 diperkirakan akan mengalami penguatan dibandingkan asumsi APBN. SBN 3 bulan yang sebesar 5,3 mungkin akan mengalami

sedikit tekanan meskipun pada kuartal atau semester kedua tahun 2019 ini diperkirakan tekanan kenaikan suku bunga global akan berkurang secara sangat drastis.

ICP yang 70 Dolar perbarell juga diperkirakan akan mengalami tekanan ke bawah, sedangkan lifting minyak dan gas juga dua-duanya diperkirakan tidak tercapai atau ada resiko mengalami pencapaian yang lebih rendah dari asumsi. Dengan kondisi tersebut maka kita akan lihat di dalam APBN kita tekanan terhadap pendapatan negara dan hibah akan terlihat dari sisi perpajakan, baik itu berasal dari resiko global, penurunan dari ekspor, investasi dan penurunan dari pendapatan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan kepada komoditas. Juga dari sisi PBNP karena masih cukup dominannya PNBPN yang berasal dari sumber daya alam.

Dari sisi belanja kita masih melihat tren dari belanja Pemerintah yang masih cukup sesuai dengan asumsi awal, yaitu realisasi belanja pada kisaran antara 94 hingga 97 dan penyerapan belanja yang diperkirakan antara 96 hingga 98%. Kami masih memperkirakan untuk defisit 2019 masih tetap terkendali sesuai dengan angka yang ada di dalam Undang-Undang APBN.

Untuk tahun 2020 perekonomian global diperkirakan akan sedikit membaik meskipun probabilitasnya juga cukup tidak pasti atau masih ada ketidakpastian yang cukup besar. Kalau kita lihat untuk proyeksi global negara maju justru mengalami pelemahan terutama dikontribusikan oleh Amerika Serikat, Eropa dan Inggris. Sedangkan untuk negara berkembang kontribusi pelemahan terhadap perekonomian global terutama adalah dari RRT yang akan sedikit mengalami penurunan dari 6,3 menjadi 6,1.

Dari volume perdagangan global kalau kita lihat kondisi tahun 2018, 2019 adalah mengalami tekanan seperti yang kita lihat di dalam kurva yang di tengah, maka di tahun 2020 diharapkan akan sedikit mengalami sentimen agak positif. Sedangkan untuk harga komoditas diperkirakan masih dalam situasi yang flat. Ini kami sampaikan tentu dengan catatan bahwa ketidakpastian terutama hubungan Amerika dengan RRT yang sekarang sudah semakin meluas tensinya tidak hanya dari masalah perdagangan, namun sudah masuk kepada masalah *security* maupun geopolitik.

Dengan ketidakpastian tersebut kita tetap harus menyampaikan apa yang akan menjadi landasan kami di dalam menyusun RAPBN 2020 dengan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita. Kami mengusulkan untuk tahun 2020 dengan tren selama 3 tahun kebelakang dari 2017-2019 *range* dari agregat demand yaitu konsumsi, investasi, ekspor, impor dan pengeluaran Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi seperti tadi disampaikan oleh Pimpinan adalah antara 5,3 hingga 5,6% dikontribusikan dari sisi permintaan, yaitu konsumsi diperkirakan antara 4,9 hingga 5,2%. Konsumsi Pemerintah antara 4,1% hingga 4,3% karena APBN kita masih akan memberikan dukungan *supportive* terhadap perekonomian dalam situasi resiko global yang semakin tidak pasti dan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia.

Investasi kita harapkan dan kita proyeksikan masih akan tumbuh di atas 7%, yaitu antara 7 hingga 7,4. Sedangkan ekspor akan tumbuh antara 5,5 hingga 7% dan impor antara 6 hingga 7,5%. Tentu melihat kondisi global terutama ekspor kita harus mengalami atau harus meningkatkan kewaspadaan terhadap proyeksi tersebut.

Kalau kita lihat beberapa lembaga multilateral yang melakukan proyeksi terhadap perekonomian Indonesia, IMF menyampaikan pertumbuhan untuk tahun 2019 dan 2020 adalah tetap di 5,2. Bank Dunia juga tetap sama sedangkan IDB

memperkirakan untuk 2019 adalah 5,2 dan 2020 sebesar 5,3. Consensus forcase untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pada angka 5,1.

Kalau kita lihat investasi yang tadi diperkirakan antara 7,0 sampai 7,4% di dalam rangka untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi antara 5,3 hingga 5,6% maka kita lihat komposisi dari pelaku investasi, baik itu investasi berasal dari Pemerintah, BUMN, perusahaan non BUMN, PMA dan dari sisi *pure private*. Kebutuhan investasi untuk bisa tumbuh antara 5,3 hingga 5,6% adalah antara 5.800 triliun hingga 5.823 triliun yang mayoritas akan dan harus berasal dari private sektor, yaitu antara 4.221 triliun hingga 4.205 triliun.

Untuk peranan Pemerintah, Pemerintah Pusat diharapkan akan bisa berkontribusi pada kisaran 246 hingga 261 triliun dan Pemerintah Daerah ada di kisaran 293 hingga 310 triliun. Ini adalah kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan proyeksi investasi Pemerintah tahun 2019 yang sebesar 215 untuk Pemerintah Pusat dan 267 triliun untuk Pemerintah Daerah.

BUMN diperkirakan masih akan melakukan ekspansi investasi meskipun tidak setinggi di banding tahun 2018, namun lebih tinggi dari perkiraan tahun 2019, yaitu antara 470 hingga 473. Sedangkan FDI dalam bentuk penanaman modal asing masih akan konstan di angka 426 hingga 428 triliun. Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,6 peranan investasi swasta menjadi sangat penting, sehingga *policy-policy* yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi sangat kunci, apakah itu perbaikan infrastruktur, produktifitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja, maupun dari sisi *policy* untuk simplifikasi dan regulasi yang bisa positif atau kondusif bagi investasi. Kami juga akan menggunakan instrument fiskal APBN di dalam rangka juga mendukung kebutuhan investasi tersebut.

Kalau tadi kita bicara dari sisi demand side maka dari sisi produksi atau supply side pertumbuhan antara 5,3 dan 5,6% diperkirakan akan dikontribusikan oleh sektor-sektor seperti yang berada di dalam table tersebut. Table ini menggambarkan bahwa sektor ekonomi yang akan memiliki pertumbuhan relative tinggi masih didominasi oleh sektor jasa, terutama perdagangan, transportasi, dan juga dari sisi informasi dan komunikasi maupun sektor jasa keuangan. Sedangkan sektor konstruksi masih akan tetap di sekitar 5 hingga 6%. Yang kita lihat disini adalah industri pengolahan yang kita harapkan akan bisa meningkat meskipun dalam level yang sangat-sangat moderat.

Nilai tukar yang kita asumsikan untuk tahun 2020 antara 14.000 hingga 15.000 nanti tentu Bank Indonesia akan juga memiliki terutama di bagian ini. Kami melihat faktor yang mendorong untuk nilai tukar adalah pertama *trade war* dan dampaknya terhadap sentimen perdagangan maupun investasi dunia. Kita juga masih memiliki defisit neraca transaksi berjalan yang menimbulkan konsekuensi terhadap nilai tukar Rupiah kita. Namun, meskipun demikian kita juga melihat faktor yang mungkin akan mendorong atau memberikan positif dampak terhadap nilai tukar kita yaitu arah kebijakan moneter dari the FAT yang akan melakukan *cost* bahkan diperkirakan akan melakukan penurunan suku bunga pada separuh tahun terakhir ini. Dan juga *capital inflow* karena adanya perbaikan sentiment terhadap ekonomi Indonesia dengan rating yang meningkat dan stabilitas yang tetap kita jaga dan daya tarik dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relative lebih tinggi dibandingkan negara-negara *emerging* yang lain.

Dari sisi inflasi kita lihat akan mengalami range antara 2 hingga 4% atau 3+-1 ini lebih baik sedikit dibandingkan tahun ini yang asumsinya 3,5 +-1. Kita tetap akan terus bersama-sama Bank Indonesia mengelola stabilitas tingkat harga antara Pemerintah dan Bank Indonesia, baik dari sisi keterjangkauan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

Dari sisi suku bunga mungkin tidak banyak berubah, meskipun kita tetap harus melihat dan meneliti dinamika suku bunga yang mempengaruhi biaya dari pembiayaan kita. SPN 3 bulan untuk Januari hingga Mei adalah 5,8% dan stabil. Lelang terakhir mencapai 5,84. Hal yang mendorong kenaikan suku bunga SPN 3 bulan adalah ketidakpastian global yang menciptakan persepsi resiko dan juga defisit transaksi berjalan yang meningkatkan persepsi investor terhadap Rupiah instrument yang ada di Indonesia. Faktor yang mendorong untuk penurunan suku bunga adalah prospek pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi termasuk inflasi yang rendah dan stabil, pendalaman pasar dari sektor keuangan, dan likuiditas dan positif sentiment terhadap *emerging market* yang menyebabkan masuknya kembali *capital flow* termasuk ke Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati. Kami menyampaikan untuk PPKF 2020 adalah pada table yang ada di dalam tayangan. Pertumbuhan antara 5,3 hingga 5,6 inflasi antara 2 hingga 4 atau 3 +-1, suku bunga SPN antara 5 hingga 5,6 dan nilai tukar antara 14.000 sampai 15.000, harga minyak antara 60 hingga 70 Dolar per barel, lifting minyak adalah antara 695 hingga 840 ribu barrel per hari dan lifting gas adalah 1.191 hingga 1.300 barel setara minyak perhari.

Kami telah menyampaikan tadi bahwa tema APBN untuk tahun 2020 adalah akselerasi daya saing di dalam rangka untuk menunjang inovasi dan juga penguatan kualitas sumber daya manusia. APBN 2020 akan didesain secara ekspansif namun terarah dan terukur, artinya tax ratio akan diperkirakan antara 11,8 hingga 12,4% dan defisit kita jaga lebih sedikit dari rendah dari tahun ini, yaitu antara 1,5 hingga 1,75 karena kita melihat adanya resiko yang lebih besar dari sisi volatilitas. Dan oleh karena itu, kita ingin menjadi jauh lebih prudent. *Primary balance* kita harapkan akan mulai menuju kepada zona positif, yaitu antara 0 hingga 0,23% dari GDP dan ratio hutang terhadap GDP kita masih akan dijaga dibawah 30% antara 29,4 hingga 30.

Fokus dari belanja maupun *policy fiskal* seperti yang kami sampaikan adalah di dalam rangka untuk memperbaiki sumber daya manusia. Ini adalah tema paling penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden di berbagai kesempatan dan ini akan menjadi porsi besar di dalam belanja negara nanti, baik ini di dalam rangka untuk pendidikan, kesehatan maupun *social safety net*. Dan juga dari sisi kemampuan kita untuk meningkatkan jenis pendidikan terutama vokasi.

Kita tetap akan melakukan pemihakan terhadap pembangunan infrastruktur terutama di dalam rangka untuk melakukan pemerataan pembangunan karena tadi GDP kita masih sangat terkonsentrasi di Jawa. Kita juga akan terus mengembangkan skema pembiayaan kreatif di dalam rangka membangun infrastruktur. Di sisi lain sepertiga dari belanja APBN adalah untuk daerah, oleh karena itu perbaikan kualitas desentralisasi fiskal di dalam rangka untuk mendorong Pemerintah Daerah di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Kami juga akan meningkatkan monitoring terhadap kualitas belanja di daerah termasuk mandatoris



spending maupun dari sisi efektifitas dan efisiensi mereka, termasuk pemanfaatan dana desa.

APBN juga akan terus mendorong perbaikan institusi terutama dari efisiensi birokrasi dan di dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan. Dan APBN akan digunakan di dalam rangka untuk mengantisipasi ketidakpastian yang berasal dari bencana alam. Kami akan terus melakukan perbaikan dari sisi mitigasi resiko bencana. Kita juga melihat ketidakpastian yang berasal dari harga komoditas dan tentu perlu kita untuk terus menjaga buffer dari fiskal kita di dalam rangka menghadapi gejolak yang masih akan terus berlangsung.

Oleh karena itu, postur APBN 2020 adalah seperti yang kami sampaikan disini ini masih semuanya dalam porsi terhadap GDP dan masih dalam range. Pendapatan negara antara 12,7 hingga 13,9% dari GDP. Kalau kita lihat tahun 2019 adalah 13,4 terhadap GDP, belanja negara antara 14,4 hingga 15,4% dari GDP, tahun 2019 adalah 15,3% dari GDP. Primary balance antara 0 hingga 0,23% dari GDP positif di dalam tahun 2019 masih negating 0,12. Dan defisit kita adalah antara 1,75 hingga 1,52% dari GDP, tahun 2019 adalah minus 1,84 dari GDP.

Pembiayaan untuk hutang neto adalah antara 2,4 hingga 2,1% dari GDP dan untuk investasi antara 0,3 hingga 0,5% dari GDP. Postur belanja kami sampaikan di sebelah kanan belanja pusat untuk KL adalah antara 4,9 hingga 5,2% dari GDP. Belanja non KL adalah antara 4,7 hingga 4,9% dari GDP dan transfer ke daerah serta dana desa akan memakan cukup besar yaitu 4,8 hingga 5,3. Kalau kita lihat hampir sepertiga dari total belanja.

Dengan postur tersebut kita akan terus menghadapi dan di satu sisi melakukan formulasi agar RAPBN 2020 tetap bisa kita susun secara kredible namun disisi lain kita juga harus terus waspada terhadap tantangan dan ketidakpastian yang akan terus berjalan hingga tahun depan. Pertama, dari sisi pembiayaan terutama untuk pembiayaan defisit kita, kita harus terus meyakinkan bahwa defisit ini adalah untuk membiayai belanja-belanja produktif sehingga bisa meningkatkan kredibilitas dan sustainabilitas dari APBN dalam jangka menengah panjang. Kita akan terus men-develop pembiayaan kreatif dan juga di dalam rangka untuk mencari sumber pembiayaan dengan suku bunga dan beban yang sekecil mungkin.

Untuk indikator 2020 oleh karena itu, kami akan mohonkan kita tutup kepada Komisi XI DPR RI persetujuan dari sisi range di dalam rangka kami untuk meneruskan penyusunan RAPBN 2020 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi antara 5,3 hingga 5,6 dan inflasi antara 2 hingga 4%, suku bunga SPN 3 bulan antara 5 hingga 5,6% dan nilai tukar kami sampaikan antara 14.000 hingga 15.000 per Dolar.

Demikian Pimpinan yang kami sampaikan sebagai pengantar PPKF dan rancangan awal dari asumsi makro untuk RAPBN 2020.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam.*

Kami persilakan kepada Bapak Bambang Menteri PPN/Kepala Bappenas.

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (BAMBANG BRODJONEGORO):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang terhormat Bapak Ketua, Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI.**

Atas nama pribadi dan atas nama Bappenas kami ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah, mohon maaf lahir dan bathin.

Untuk melengkapi apa yang baru saja disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, kami akan menyampaikan rancangan RKP tahun 2020 di mana kita melihat bagaimana perkembangan beberapa indikator perekonomian selain pertumbuhan kita juga bicara kemiskinan, ketimpangan dan juga pengangguran.

Kalau kita mulai dengan perekonomian yang tadi sudah kita bahas kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun belakangan ini terutama di tahun triwulan pertama di tahun 2019 dan di tahun 2018 masih sangat bertumpu kepada konsumsi rumah tangga. Dan kita melihat peranan investasi yang diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan tampaknya belum kelihatan paling tidak di triwulan pertama, meskipun di tahun 2018 investasi sudah tumbuh di atas 6%. Dan kalau kita lihat di triwulan I 2019 dimana pertumbuhannya 5,07% maka kita bisa melihat pola yang berulang di setiap tahun di setiap triwulan I atau kuartal I, selalu pertumbuhannya itu relative yang paling kecil dibandingkan triwulan-triwulan lainnya. Jadi kita harapkan di tahun 2019 dengan start awal di 5,07% yang paling tidak masih lebih tinggi dari start awal di tahun 2018 kita berharap pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 bisa lebih baik daripada 2018.

Kemudian kalau kita lihat stabilitas ekonomi, inflasi paling tidak kita lihat relative sudah cukup stabil dan rendah. Tahun lalu 3,13% bulan Mei kemarin yang terakhir year on year adalah 3,3%. Dan kalau bicara mengenai inflasi maka perhatian harus diberikan kepada inflasi dari harga pangan bergejolak yang kalau kita lihat di grafik itu yang menentukan tinggi rendahnya inflasi di dalam suatu periode. Mengenai Kurs tadi sudah disampaikan sempat mendapat tekanan di tahun 2018 tapi menjurus stabil sampai saat ini, diantara 14.000 sampai 14.500.

Mengenai pengangguran karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, maka kita harapkan akan ada pencipta lapangan kerja yang bisa mengurangi pengangguran. Penciptaan lapangan kerja kalau kita perhatikan di grafik sebelah kanan 2016 memang yang paling tinggi penciptaan lapangan kerjanya, ini mengutip data dari Sakernas yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 3,6 juta dan di tahun 2017 sebesar 2,6 juta dan tahun 2018 juga 3 juta. Jadi target dalam RPJMN penciptaan 10 juta lapangan kerja praktis sudah hampir tercapai di tahun 2018 kemarin dan tahun ini kalau kita bisa menciptakan lagi lapangan kerja antara 2,6 sampai 2,9 maka jumlahnya sudah pasti di atas 10 juta.

Untuk tingkat penganggurannya sendiri menunjukkan kecenderungan terus menurun berdasarkan Satkernas Agustus 2018 tingkat pengangguran adalah 5,34% atau kira-kira setara dengan 7 juta angkatan kerja di Indonesia. Dan kita harapkan tahun 2019 kita bisa turunkan lagi lebih dekat ke 5%. Meskipun pengangguran terbuka

menunjukkan kecenderungan menurun dan mendekati 5% namun ada 3 hal yang harus diwaspadai terkait dengan angka pengangguran itu sendiri. Pertama, kalau kita lihat tingkat pengangguran terbuka menurut usia maka tingkat pengangguran terbuka usia muda khususnya usia 15 sampai 24 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya terlihat di grafik yang paling atas, di mana 15-19 maupun 20-24 itu ada jauh di atas tingkat pengangguran nasional yang 5,34%. Artinya, dengan bonus demografi yang kita miliki sekarang di mana jumlah penduduknya akan didominasi penduduk usia muda maka pengangguran usia muda adalah satu hal yang benar-benar harus segera diatasi.

Selain itu, isu kedua adalah yang disebut setengah pengangguran adalah kebanyakan yang bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi atau dengan tingkat pendidikannya. Angkanya memang cenderung terus menurun namun dengan angka atau presentase 2018 yaitu 6,6 juta maka masih praktis ada 8,2 juta orang yang berstatus setengah pengangguran.

Satu lagi sesuai dengan upaya Pemerintah untuk mulai membenahi pendidikan vokasi kita memang harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang SMK itu ternyata lebih tinggi daripada tingkat pengangguran terbuka yang lulusan SMA, SMK 11,24% dan yang SMA 8%. Angka ini tentunya Bapak dan Ibu tahu persis harusnya terbalik. Ini artinya memang diperlukan pembenahan besar-besaran dibidang pendidikan vokasi khususnya di sekolah menengah. Untuk yang Diploma tingkat pengangguran terbukanya sedikit lebih tinggi dari pengangguran terbuka nasional pada tingkatan 6%.

Satu hal lagi yang perlu mendapatkan perhatian adalah meningkatnya tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas. Jadi meskipun semakin banyak yang lulus universitas tetapi rupanya penciptaan atau penyerapan lapangan kerja menjadi masalah terutama terjadi karena adanya *mismatch* antara apa yang dihasilkan dari pendidikan dengan apa yang menjadi kebutuhan di pasar. Jadi ada 3 hal soal pengangguran yang kemudian menuntut kita untuk memberikan perhatian lebih atau memprioritaskan tidak hanya pada pendidikan akan tetapi juga pada isu penciptaan lapangan kerja, yaitu *mismatch* atau mencegah *mismatch* antara sektor pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Untuk tingkat kemiskinan kita sudah masuk territory single digit sejak 2018 yang kemudian kembali turun di bulan September menjadi 9,66% dan kita harapkan bisa turun lagi di bawah 9% di tahun 2019 dan tentunya di tahun 2020. Dan kita lihat juga bahwa upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan bisa terjadi kalau pertumbuhan ekonomi bisa lebih digeser manfaatnya untuk kelompok yang miskin dan rentan miskin. Karenanya, bantuan sosial tepat sasaran dan juga pemberian mikro finance atau kredit mikro menjadi penting, terutama untuk kelompok yang dikategorikan miskin dan rentan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan itu sendiri.

Ketimpangan yang dinyatakan dengan ratio gini juga terus menurun, di tahun 2011 atau di tahun sebelum Pemerintahan ini pernah mencapai 0,414 yang terakhir sudah menjadi 0,384. Dan kita harapkan 2019 lebih bergerak menuju 0,38 dan 2020 sudah dibawah 0,38. Dan kalau kita lihat antara perkotaan dan perdesaan penurunan ratio gini secara konsisten ini terutama didorong oleh penurunan ketimpangan diperkotaan. Di perdesaan sempat terjadi sedikit kenaikan tapi kemudian sudah terjadi

penurunan kembali dalam konteks ketimpangan antara kelompok pendapatan di perdesaan.

Untuk satu lagi indikator pembangunan yang terkait dengan manusia Indonesia, yaitu *human development indeks* satu indek pembangunan manusia kita bisa melihat bahwa tahun 2018 kita mempunyai indeks 71,39 di atas 70 artinya Indonesia sudah termasuk *high human development indeks*. Dan tahun 2019 harapannya naik lagi mendekati 72 dan 2020 kita harapkan naik menjadi 72,5. Dan 72,5 itu tentunya harus kita upayakan melalui perbaikan angka harapan hidup yang 2019 ini targetnya 71,3 tahun menjadi 71,5 tahun. Kemudian untuk rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun atau lebih kita harapkan meningkat dari 8,3 menjadi 8,4 tahun. Kemudian yang harapan lama sekolah penduduk 7 tahun meningkat dari 13,2 menjadi 13,4 tahun ditarget 2020. Kemudian untuk pengelolaan perkapita kita harapkan meningkat dari 11,1 juta Rupiah per tahun di tahun 2019 menjadi 11,3 juta Rupiah per tahun di tahun 2020. Itu adalah kondisi atau perkembangan indikator perkembangan terakhir sehingga untuk arah kebijakan makro tahun 2020 ada beberapa hal yang akan menjadi prioritas dan strategis dari Pemerintah, yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan potensial karena ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini kalau dari perhitungan pertumbuhan potensial Indonesia itu sudah tertahan di angka 5,3%. Jadi pertumbuhan tahun lalu 5,17 itu sudah mulai mendekati maksimum pertumbuhan yang bisa dicapai Indonesia pada periode 3 tahun terakhir 2017 sampai 2019. Karenanya harus ada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia ini dari 5,3% tadi.

Nah, beberapa strategi yang kita harapkan bisa berjalan yaitu pertama transformasi structural. Transformasi structural itu tidak hanya dibicara revitalisasi industry pengolahan, tidak hanya bicara sektor manufactur saja yang tetap harus dikembangkan dan terutama kita mengejar target ratio kontribusi industry pengolahan terhadap PDB itu bisa diatas 20%. Tetapi selain industry pengolahan pertanian juga harus dimodernisasi artinya kata kuncinya adalah produktifitas dari sektor pertanian harus ditingkatkan. Kemudian pertambangan itu harus dihilirisasi jadi mendorong juga industrialisasi. Dan sektor jasa termasuk pariwisata dan jasa-jasa lainnya harus ditransformasikan menjadi sektor jasa modern.

Tadi dikatakan oleh Menteri Keuangan kalau sektor jasa tidak di transformasi maka kita akan bisa menghasilkan sektor jasa yang besar akan tetapi tidak memberikan *income* yang memadai bagi para pelakunya. Karena itulah transformasi sektor jasa menjadi sektor jasa modern termasuk di pariwisata menjadi kata kunci.

Kemudian selain transformasi structural perlu juga penguatan permintaan domestic terutama kalau kita lihat pertumbuhan kita tidak lagi bisa hanya bertumpu pada konsumsi akan tetapi tetap harus mendorong investasi. Investasi harus didorong di pertumbuhan sekitar 7% per tahun apabila kita ingin pertumbuhan ekonomi itu mulai keluar dari output optimal atau maksimal pertumbuhan maksimal disekitar 5,3%.

Selain itu diversifikasi ekspor dan juga menjaga keberlanjutan fiskal dengan adanya stimulus untuk perekonomian. Selain meningkatkan pertumbuhan potensial kita harus menjaga stabilitas makro baik itu harga, stabilitas eksternal, neraca perdagangan, transaksi berjalan, dan juga stabilitas sektor keuangan yang nanti mungkin akan lebih dielaborasi oleh pihak OJK. Dan kemudian memastikan inklusifitas dan keberlanjutan, baik itu dalam konteks pemerataan, kemiskinan, memperluas akses serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Nah, kalau kita lihat sasaran pertumbuhan ekonomi 2020 yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan 5,3 sampai 5,6 maka Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri tumpuannya tidak hanya menjaga pertumbuhan konsumsi di seputaran 5% tetapi yang lebih penting bagaimana mendorong investasi bisa 7% atau lebih kalau kita benar-benar ingin mencapai pertumbuhan 5,3 sampai dengan 5,6.

Ekspor karena ada kondisi global yang tidak mudah memang hanya ditargetkan tumbuh antara 5,5 sampai 7% dan ini juga bukan hal yang mudah untuk bisa dicapai, itu dari segi agregat demand. Dari segi sectoral kalau kita lihat 3 sektor yang menyumbang terbesar dalam perekonomian, yaitu pertanian, industry manufactur, dan perdagangan harus bisa tumbuh lebih tinggi daripada sebelumnya. Pertanian kita harapkan bisa tumbuh sampai 4% mendekati 4%, industry manufactur kita harapkan bisa tumbuh 5% atau lebih sedangkan perdagangan kita harapkan sudah mulai pulih karena pernah tumbuh hanya 2%, 3% kita harapkan perdagangan kembali tumbuh antara 5,4 sampai 5,8. Selain itu kita lihat jasa-jasa lain juga mempunyai pertumbuhan yang tinggi demikian juga sektor konstruksi yang masih juga menyumbang pertumbuhan dari 5,7 sampai 6%.

Dengan itu kita ingin dengan target atau dengan kondisi yang ada dan dengan target yang kita inginkan, maka terget pembangunan tahun 2020 yang kami usulkan kepada Ibu dan Bapak di Komisi XI DPR RI, selain pertumbuhan ekonomi 5,3 sampai 5,6 yang sudah disampaikan, IPM kita yang kita harapkan bisa mencapai 72,5 dan tingkat kemiskinan di-range 8,5 sampai 9%, gini ratio 0,375 sampai 0,38 dan tingkat pengangguran terbuka 4,8 sampai 5,1%.

Bicara mengenai pertumbuhan ekonomi tentunya salah satu isu adalah masalah ketimpangan. Dan ketimpangan pendapatan salah satunya terjadi juga karena ketimpangan antar daerah. Karena itu, di dalam strategi untuk perekonomian 2020 kami mengupayakan agar mulai ada yang namanya penyebaran sumber pertumbuhan ekonomi. Tidak terpusat hanya di Pulau Jawa yang menyumbang 5,8% PDB Indonesia dan juga Pulau Sumatera 22%. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat Jawa dan Sumatera saja menyumbang 80% di mana yang lainnya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua hanya menyumbang 20%.

Nah, tentunya harus ada strategi untuk penyebaran pertumbuhan ekonomi khususnya keluar Jawa termasuk industrialisasi. Nah, di Sumatera beberapa prioritas tentunya bukan hanya program yang dikembangkan di Sumatera akan tetapi prioritas itu adalah ketahanan bencana di pantai barat, seluruh pantai barat Sumatera yang memang rawan gempa bumi besar dan Tsunami. Kemudian hilirisasi atau industrialisasi khususnya untuk komoditas unggulan di Sumatera, utamanya adalah sawit dan karet.

Kemudian yang berikutnya adalah SDM terutama untuk mendukung industrialisasi tersebut. Jadi kita harus perbanyak memberikan vokasi untuk mendukung industrialisasi diluar Pulau Jawa. Di Kalimantan fokus adalah konektivitas wilayah, antar wilayah di Kalimantan, kemudian hilirisasi khususnya hasil perkebunan dan juga hasil tambang. Di Kalimantan kita tahu ada hasil tambang yang cukup besar, yaitu boksit di Kalimantan Barat yang segera akan dibuat smelter Alumina yang ada di Kalimantan Barat dan demikian juga pengembangan kawasan industry di Kalimantan Utara yang juga merupakan hilirisasi dari hasil tambang.

Yang lainnya adalah percepatan pembangunan kawasan pedesaan, tertinggal dan perbatasan. Di Sulawesi fokusnya adalah ketahanan bencana alam termasuk pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Kemudian hilirisasi khususnya di industrialisasi di perikanan, pertanian dan logal dasar. Artinya, perikanan karena kita tahu bahwa produksi yang besar ada di Sulawesi dan pertanian khususnya misalnya industry turunan dari kakao atau coklat. Logam dasar karena Sulawesi itu banyak nikel, sehingga nikel itu bisa hilirisasi menjadi berbagai macam logam dasar. Dan kemudian pengembangan kawasan wisata, jadi beberapa daerah misalkan di Sulawesi Tenggara Wakatobi, di Sulawesi Selatan Toraja, dan juga di Sulawesi Utara di sekitar Manado.

Kemudian untuk Maluku fokus adalah hilirisasi perikanan, industry pengolahan hasil perikanan, konektifitas antar pulau untuk mendukung perikanan dan pariwisata serta percepatan pembangunan di kawasan pedesaan tertinggal dan perbatasan. Di Papua prioritasnya adalah tol udara untuk memperkuat konektifitas wilayah.

Nah, perlu kami jelaskan bahwa tol udara ini utamanya untuk daerah pegunungan di Papua yang memang sulit dijangkau dengan jalan darat, sehingga ini akan melengkapi antara tol udara dengan jalan darat yang mungkin lebih banyak menghubungkan daerah-daerah wilayah pantai maupun wilayah tengah Papua.

Untuk SDM Di Papua kita fokuskan pada pendidikan vokasi pertanian, perkebunan, perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan. Dan optimalisasi pelaksanaan Otsus khususnya pemberdayaan masyarakat terhadap kemudian penguatan peran distrik atau kecamatan, penguatan kerjasama antar kabupaten serta pengembangan kawasan perbatasan.

Untuk Nusa Tenggara prioritasnya adalah pariwisata khususnya kita ingin segera menuntaskan pembangunan kawasan pariwisata terpadu di Mandalika NTB, Labuan Bajo di NTT dan Tomboka yang ada di NTB. Kemudian peningkatan pendidikan vokasi khususnya pariwisata, perikanan, dan peternakan serta penguatan konektifitas antar pulau untuk mendukung industry atau sektor unggulan yang ada di Nusa Tenggara.

Dan terakhir untuk di Jawa-Bali prioritasnya adalah bencana khususnya di Pantai Selatan dan Pantai Barat Pulau Jawa. Kemudian sarana transportasi massal perkotaan, MRT dan LRT atau BRT dan kemudian pengembangan Bali bagian utara yang tertinggal jauh di banding Bali bagian selatan.

Kemudian untuk penguatan pembangunan daerah tadi beberapakali kami menyebut mengenai bencana alam, karena kita tahun 2020 dan khususnya RPJMN 5 tahun kedepan memberikan prioritas yang tinggi kepada upaya kita melakukan mitigasi terhadap bencana alam. Kita melihat bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat resiko bencana yang tertinggi di dunia dan penyebabnya adalah tingginya *exposure and furner ability* jadi negara kita sangat terekspose dan rentan terhadap bencana itu sendiri.

Dan kalau kita lihat bencana 5 tahun terakhir meskipun mungkin yang sering mendomnasi berita adalah gempa besar dan tsunami tapi bencana yang paling sering terjadi adalah bencana terkait dengan air, yaitu banjir, tanah longsor, dan putting beliung. Dan kemudian kita akan memastikan bahwa Pemda sudah memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dalam perjalanan mereka dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Nah, untuk mencapai target pembangunan tersebut dan penyebaran kegiatan ekonomi di Indonesia maka kami menyusun RKP 2020 yang seharusnya berdasarkan RPJMN 2020-2024. Tapi karena RPJMN 2020-2024 belum ada karena menunggu nanti setelah pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober, maka yang kami gunakan saat ini sebagai referensi atau sebagai landasan penyusunan adalah RPJMN demokratis yang dibuat oleh Bappenas sendiri. Tentunya dengan melibatkan banyak-banyak pihak tetapi belum menjadi RPJMN yang resmi dinyatakan dalam Perpres.

Nah, untuk RPJMN demokratis yang menjadi dasar dari RKP 2020, temanya adalah Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Kata menengah tinggi ini kami masukkan karena tahun 2020 diperkirakan Indonesia sudah naik kelas dari negara berpendapatan menengah rendah atau menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dengan GDP per kapita di sekitar 4000 US Dolar per kapita.

Untuk mencapai cita-cita 5 tahun tersebut ada 5 fokus yang akan ditekankan, yaitu fokus pengelolaan manusia yang mencakup pelayanan dasar perlindungan sosial, SDM berkualitas dan pembangunan karakter bangsa. Kemudian fokus pembangunan ekonomi baik di pangan, energi, pariwisata, manufaktur, kelautan dan kemaritiman. Untuk pembangunan kewilayahan kita fokus pada penciptaan sentra pertumbuhan, mendorong komoditas unggulan daerah, dan pertumbuhan di wilayah perkotaan.

Kemudian fokus pembangunan infrastruktur ada di transportasi, telekomunikasi, SDA, perumahan dan pemukiman. Sedangkan untuk politik, hukum, pertahanan dan keamanan fokus pada hukum regulasi, Hankam dan politik. Ada dua *development constrain*, yaitu kondisi pembiayaan dan kondisi sumber daya alam dan 6 pengarus utamaan atau *main streaming*, yaitu kesetaraan gender, governance, pembangunan berkelanjutan, kerentanan bencana, perubahan iklim, modal sosial budaya dan transformasi digital dengan kaidah kemandirian, keadilan dan berkelanjutan.

Nah, sebagai implimentasi dari tahun pertama RPJMN 2020-2024 maka RKP tahun 2020 bertema peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Jadi temanya sejalan dengan apa yang selalu diulang oleh Bapak Presiden mengenai pentingnya kita memberikan perhatian lebih kepada penguatan sumber daya manusia.

Ada 5 prioritas nasional, yaitu pertama pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah. Yang ketiga, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja. Yang keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Dan kelima, stabilitas Hankam dengan pengarusutamaan yang sama dengan RPJMN tadi.

Untuk prioritas nasional pertama ada 5 program prioritas, yaitu perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan IPTEK inovasi, yang keempat pengentasan kemiskinan dan kelima adalah pembangunan budaya, karakter dan prestasi bangsa.

Untuk prioritas nasional kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah. 5 program prioritas, yaitu infrastruktur dasar, infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana. Kemudian peningkatan konektivitas multi moda dan antar moda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian peningkatan infrastruktur perkotaan dan kelima adalah transformasi digital.

Untuk prioritas nasional ketiga, nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja. 5 program prioritas, yaitu kewirausahaan dan UMKM, nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi produktifitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, ekspor bernilai tambah tinggi dan TKDN, serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Untuk prioritas nasional yang keempat, ketahanan pangan, air dan lingkungan hidup, program prioritasnya adalah pada akses dan kualitas pangan, akses dan kualitas air, yang ketiga adalah peningkatan energi baru dan terbarukan. Yang keempat adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dan kelima adalah penguatan ketahanan bencana.

Dan untuk prioritas nasional yang kelima yang terakhir adalah Hankam, program prioritasnya adalah penguatan pertahanan, diplomasi dan kerjasama pembangunan internasional, sistem peradilan dan anti korupsi, penanggulangan terorisme, cyber dan keamanan laut serta penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

Dan untuk mencapai berbagai macam tujuan tersebut selain APBN yang sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Menteri Keuangan, maka dalam perencanaan 2020 maupun dalam 5 tahun kedepan kita akan mendorong partisipasi dari berbagai pihak dalam pendanaan pembangunan, baik itu melalui masyarakat misalkan melalui CSR maupun dana sosial keagamaan, kemudian dunia usaha terutama KPBU dan pembiayaan investasi non anggaran, kemudian penugasan kepada BUMN untuk beberapa sektor strategis serta dari APBN itu sendiri, baik yang langsung dari Kementerian Lembaga, maupun yang melalui transfer daerah.

Demikian Bapak Ketua yang bisa kami sampaikan terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam.*

Yang berikutnya saudara Gubernur Bank Indonesia.

**GUBERNUR BANK INDONESIA:**

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua,**  
*Om swasti astu,*  
*Namo budaya,*  
*Salam kebajikan,*  
*Shalom.*



Atas nama Bank Indonesia dan juga atas nama pribadi kami juga menghaturkan selamat Idul Fitri 1440 Hijriah, mohon maaf lahir dan bathin.

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pandangan Bank Indonesia terkait dengan kondisi perekonomian terkini dan prospek kedepan terutama pada beberapa asumsi makro ekonomi RAPBN 2020 yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah dan inflasi.

Tadi Ibu Menteri sudah menyampaikan bahwa kondisi global tidak menentu baik dari sisi pertumbuhan ekonomi yang menurun maupun yang lain mungkin saya akan skip saja langsung slide nomor 5 saja tidak mengulangi. Bahwa dari yang disampaikan Ibu Menteri tadi bahwa kondisi global pertumbuhan ekonomi yang menurun, harga komoditas yang juga turun ketidakpastian pasar keuangan global yang tidak menentu termasuk juga dampak dari perang dagang juga telah berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Pada triwulan I ekonomi kita tumbuh 5,07 terutama memang kinerja eksternal kita khususnya ekspor yang menurun. Sementara itu juga investasi swasta juga belum naik. Oleh karena itu, untuk tahun 2019 ini kami di Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2019 diperkirakan akan lebih rendah dari titik tengah kisaran kami 5 sampai 5,4%.

Demikian untuk tahun 2020 Bank Indonesia meyakini bahwa prospek ekonomi nasional akan membaik. Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan berada dalam kisaran 5,1 sampai dengan 5,5%. Prospek ini ditopang oleh permintaan domestik yang meningkat kinerja sektor eksternal yang mulai membaik. Dari sisi permintaan domestik konsumsi diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi sementara investasi khususnya investasi swasta juga diperkirakan untuk tumbuh meningkat. Sementara itu prospek ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan proyeksi ekonomi global yang mulai meningkat maupun juga harga komoditas yang juga membaik.

Prospek ekonomi domestik yang membaik ini juga ditopang oleh perbaikan efisiensi dan produktifitas perekonomian Indonesia sejalan dengan dampak positif dari berbagai kebijakan reformasi structural seperti infrastruktur perbaikan iklim investasi maupun sejumlah kebijakan lain yang ditempuh oleh Pemerintah,

### **Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.**

Di samping berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, perekonomian global juga berdampak kepada sisi eksternal ekonomi Indonesia. Namun demikian, bauran kebijakan yang secara konsisten di tempuh Bank Indonesia dengan sinergi yang kuat dengan kebijakan Pemerintah mampu menjaga stabilitas perekonomian dari dampak negative perekonomian global.

Hal ini terefleksi pada neraca pembayaran Indonesia pada triwulan I 2019 yang mencatat surplus 2,4 miliar Dolar Amerika Serikat. Ini terutama karena berlanjutnya aliran modal asing yang mencatat surplus 10,1 miliar sementara defisit transaksi berjalan terkendali pada 7 miliar Dolar Amerika Serikat atau 2,6% dari PDB.

Dengan kinerja ini memang sejak triwulan 4 tahun lalu kinerja sektor eksternal kita itu dari sisi neraca pembayaran menunjukkan perbaikan. Stabilitas eksternal ekonomi Indonesia juga tercermin dari perkembangan nilai tukar Rupiah yang tetap terkendali meskipun ketidakpastian global dan faktor permintaan domestik untuk

kebutuhan pembayaran deviden dan non residen memang memberikan tekanan pada triwulan 2 2019.

Nilai tukar Rupiah sampai dengan tanggal 12 Juni tercatat Rp14.235 per US Dolar atau menguat 1,02% bila dibandingkan dengan tingkat akhir 2018 yang pada waktu itu Rp14.380. Dengan perkembangan ini pula secara rata-rata nilai tukar Rupiah 2019 mencapai 14.188 atau menguat 0,41% dibandingkan dengan rata-rata 2018 yang tercatat 14.246.

Ke depan Bank Indonesia memperkirakan kondisi eksternal kita juga akan membaik antara lain juga neraca pembayaran kita di tahun 2019 kami perkirakan juga akan mencatat surplus sejalan dengan prospek aliran masuk modal asing yang berlanjut. Defisit transaksi berjalan juga kami perkirakan lebih rendah dari tahun 2018 yang kami perkirakan akan berada pada kisaran 2,5 sampai 3% PDB. Meskipun memang tingkat ini tidak serendah perkiraan semula.

Dengan kondisi neraca pembayaran yang mencatat surplus ini kami memperkirakan bahwa rata-rata nilai tukar Rupiah pada tahun 2019 akan berada pada kisaran 14.000 sampai 14.400 per Dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan tahun 2020 kami memperkirakan bahwa prospek penguatan neraca pembayaran Indonesia akan berlanjut pada tahun 2020. Defisit transaksi berjalan akan kami perkirakan juga akan terkendali pada 2,5 sampai 3% PDB ditopang oleh kondisi global yang membaik sehingga mendukung kinerja ekspor Indonesia serta juga upaya-upaya yang terus dilakukan antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan termasuk penguatan kinerja investasi ekspor dan sektor pariwisata.

Aliran masuk modal asing juga kami perkirakan akan terus berlanjut sejalan dengan prospek perekonomian kita yang membaik juga berbagai upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mendorong investasi masuk maupun juga kondisi moneter global yang melonggar. Dengan berbagai faktor tersebut kami memperkirakan bahwa rata-rata nilai tukar pada tahun 2020 akan berada pada kisaran 13.900 sampai dengan 14.300 per Dolar Amerika Serikat.

Prospek nilai tukar Rupiah ini juga didukung oleh berbagai upaya yang terus kami lakukan untuk memperdalam pasar keuangan khususnya pasar valuta asing termasuk dengan *domestic non delivery forward*.

### **Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.**

Perekonomian domestic yang tetap baik dan nilai tukar yang terkendali juga menopang tetap rendahnya dan terkendalnya inflasi pada bulan Mei yang lalu sebagaimana kita ketahui inflasi tercatat 3,32%. Kami memperkirakan pada bulan-bulan kedepan juga inflasi akan tetap rendah dan terkendali, baik dari sisi inflasi inti, harga pangan maupun juga admister prices termasuk juga kordinasi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tingkat pusat melalui tim pengendalian inflasi pusat maupun di daerah tim pengendalian inflasi daerah.

Pada akhir tahun ini kami memperkirakan bahwa inflasi akan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran inflasi 3,5 +-1%. Pada tahun 2020 kami memperkirakan juga inflasi akan tetap rendah dan terkendali pada kisaran target 3%+-1%. Tren penurunan inflasi pada tahun 2020 dipengaruhi oleh inflasi inti yang terkendali sejalan dengan masih memadainya kapasitas produksi domestic dalam memenuhi kenaikan permintaan.

Distribusi barang dan jasa juga semakin baik sejalan dengan ketersediaan connectifitas yang berdampak positif pada penurunan biaya transportasi dan logistic dan akhirnya pada inflasi. Prospek inflasi yang rendah juga dipengaruhi oleh kordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengendalikan inflasi bahan pangan. Inflasi juga terjaga demikian juga stabilitas nilai tukar Rupiah yang terkendali.

**Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.**

Dengan berbagai gambaran tersebut kami juga melihat bahwa secara keseluruhan prospek perekonomian Indonesia tetap positif. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi akan membaik, ketahanan eksternal terjaga, nilai tukar terkendali dan inflasi yang rendah. Optimisme ini juga ditopang oleh kepercayaan investor antara lain dengan kenaikan peringkat dari standar yang terakhir.

Dengan prospek tersebut secara keseluruhan dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperkirakan untuk tahun 2020 gambaran makro ekonominya sebagai berikut. pertumbuhan ekonomi 5,1 sampai dengan 5,5% dan nilai tukar 13.900 sampai dengan 14.300 dan inflasi 3%+-1.

Untuk mendukung stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia akan secara konsisten mengoptimalkan bauran kebijakan sehingga dapat memperkuat prospek perekonomian Indonesia tersebut. Dalam kaitan ini Bank Indonesia akan terus mencermati kondisi pasar keuangan global dan stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dalam mempertimbangkan terbukanya ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Bank Indonesia juga akan tetap memastikan bahwa likuiditas perbankan itu longgar tersedia untuk mendorong penyaluran kredit oleh perbankan. Kebijakan makro juga akan terus kami lakukan secara akomodatif untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Demikian juga kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga terus kami lakukan untuk bersinergi dengan Pemerintah. Kordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait termasuk OJK terus dipererat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestic, meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing.

**Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormati.**

Demikian tadi pokok-pokok pandangan Bank Indonesia terkait beberapa asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2020 yang dapat kami sampaikan.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Kami persilakan Ketua OJK.

## **DEWAN KOMISIONER OJK:**

Terima kasih Bapak Ketua.

**Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi XI DPR RI serta para Anggota Komisi XI yang kami muliakan,  
Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.**

Dalam kesempatan ini pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kami diundang pada rapat sore hari ini dalam membahas asumsi dasar dalam rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2020. Dan juga kami atas nama Dewan Komisioner mengucapkan Minal Aidzin Wal' Faidzin, selamat hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan mohon maaf lahir bathin.

Kami tidak akan mengulang yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brodjonegoro dan Bapak Gubernur. Kami akan langsung saja kepada sektor jasa keuangan. Pada dasarnya kami juga mengeko bahwa pertumbuhan ekonomi global diprediksikan akan melambat dan kita sepakati itu dan suka atau tidak suka juga ada *trade war* yang juga akan berpengaruh kepada bagaimana strategi kita di dalam negeri untuk menyiasati agar ini bisa memberikan manfaat. Bukan saja ini harus kita berhati-hati tetapi juga bagaimana menyiasati agar kita bisa mendapatkan manfaat dari itu.

Untuk itu, kami akan mulai meng-update kondisi sektor keuangan yang terakhir dan nanti akan kami sampaikan beberapa hal yang bagaimana kita bisa mendukung dalam pencapaian tadi proyeksi-proyeksi ekonomi yang disampaikan pada pembicara sebelumnya.

### **Bapak dan Ibu yang kami muliakan.**

Pada dasarnya pada sepanjang tahun 2019 kondisi sektor keuangan kami jaga stabil dan juga meskipun ada berbagai tekanan beberapa waktu yang lalu, namun kami bisa menjaga agar dampak negatifnya tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita dan kita juga menjaga agar....

## **KETUA RAPAT:**

Sebentar, saya stunment saja ini.

## **DEWAN KOMISIONER OJK:**

Jadi kami yakini bahwa kondisi individual juga masih sehat, lembaga jasa keuangan yang lain cukup baik dan juga volatilitas di pasar modal juga terjaga dengan baik. Dapat kami sampaikan bahwa indeks harga saham yang ditutup pada 12 Juni menguat ke level sebesar 1,32% ke level 6.276 sudah diatas 6.000 lagi, meskipun beberapa waktu yang lalu sempat tertahan di bawah 6000. Sedangkan nilai tukar

Rupiah ditutup pada 14.230 menguat sebesar 1,2%. SBN tenor 10 tahun berada di level 7,8%. Selama Juni 2019 terjadi aksi beli oleh investor asing sebesar 0,5 triliun di pasar saham dan di SBN net buy 0,5 triliun dan SBN net sale sebesar 2,3 miliar, namun secara year to date masih net buy sebesar 114,7 triliun.

Di sisi intermediasi dapat kami sampaikan bahwa kredit perbankan mengalami double digit ada 11,5% di bulan April, meskipun dana masyarakat memang pertumbuhannya tidak setinggi bila kita bandingkan waktu-waktu sebelumnya, yaitu per April 6,63%. Pertumbuhan kredit perbankan dapat kami sampaikan diluar kebiasaannya bahwa sekarang ini kredit investasi tumbuh 14,34% dan juga kredit modal kerja 10,48% secara YOY. Dan kredit konsumsi tumbuh 9,0% yang biasanya kalau kita lihat dalam sejarahnya konsumsi kita yang paling tinggi, tapi sudah sejak 2 tahun terakhir ini justru produktifnya yang lebih tinggi. Sedangkan IKNP pertumbuhan puitang pembiayaan akhir April sebesar 4,52%.

Dan juga kami sampaikan bahwa pertumbuhan fintech cukup tinggi, yaitu sebesar 63% year to date atau dalam Rupiah sebesar 8,2 triliun. Dan dalam perusahaan fintech yang terdaftar sebesar 113 perusahaan dan ini akan kita track terus karena ini pertumbuhannya cukup tinggi. Dan kami selalu memonitor agar akses-akses di masyarakat juga bisa diminimalisir.

Kalau di pasar modal dapat kami sampaikan sampai Mei kemarin tercatat sebesar rising fund di pasar modal 54,71 triliun yang berasal dari 52 penawaran umum sepanjang 2018 dapat kami sampaikan ada 168 penawaran umum dan dalam Rupiah sebesar 166 triliun. Dan pada tahun ini sebesar 40,6 triliun dalam proses penawaran, sehingga kalau kami hubungkan dengan tadi target-target untuk mendukung investasi sebesar 3,2% kami optimis bisa tercapai dari pasar modal yang tentunya sekitar 186 triliun di tahun ini.

Dapat kami sampaikan juga dalam tahun ini resiko kredit relative terkendali yang ini ditunjukkan oleh NPL sebesar 2,56% dengan tren yang menurun sementara NPF 2,76%. Di samping itu juga likuiditas cukup terjaga dengan berbagai indikator per NCD 91,64 dan LDR sudah menurun sebesar 93,58% yang di mana kemarin beberapa waktu yang lalu sempat naik sampai 94%. Kalau kita lihat permodalan perbankan cukup tinggi, yaitu 23,47% ini kuat untuk mendukung pertumbuhan kredit yang tadi sebagaimana target sekitar 10% ini masih bisa bahkan lebih dari itu sebenarnya. Dan juga bagaimana likuiditasnya juga kami yakin ini bisa untuk mendukung pertumbuhan kredit sebagaimana yang tadi ditargetkan.

Namun demikian, kami dapat sampaikan memang untuk tahun 2019 sampai 2020 yang di mana ekonomi global melambat ini juga merupakan tantangan yang harus kita betul-betul kita harus ada satu strategi yang harus kita yakini itu cocok bagaimana kita bisa *men-create* satu demand yang tadi bisa menyerap pertumbuhan kredit maupun di pasar modal dalam pembiayaan dari berbagai proyek tadi. Dan terutama bagaimana kita menjaga ini, terima kasih tadi Bapak Gubernur dan Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan beberapa paparan yang mestinya ini memberikan situasi yang kondusif bagi sektor usaha untuk bisa melakukan kegiatannya dan sehingga menimbulkan demand yang cukup besar bagi industry jasa keuangan sehingga kita bisa melakukan pembiayaan-pembiayaan tersebut.

Jadi mencermati berbagai asumsi dasar tadi, kami ingin menyampaikan beberapa strategi yang tentunya untuk agar berbagai target tadi bisa tercapai. Kita tahu ada beberapa implikasi global tapi ada beberapa point yang nanti tentunya ini

akan menjaga arah kebijakan kita kepada sektor-sektor jasa keuangan. Yang pertama, kita akan mendorong untuk industrialisasi dari berbagai sektor yang menciptakan produk ekspor. Dan industrialisasi ini harus memberikan kompetitif *advantist* bagi para pengusaha sehingga bisa bersaing di internasional. Tentunya dalam hal ini kita tadi dapat kami sampaikan meskipun ini ada *trade war*, bagaimana dengan Cina tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sehingga nanti kita bisa justru kita bisa ekspor lebih banyak lagi kepada Amerika maupun negara-negara lain. Dan ini perindustri harusnya kita *mapping*, kami akan bekerja sama dengan berbagai sektor termasuk industry perbankan agar industry mana yang akan kita dorong dan ini supaya menimbulkan multiplayer ekonomi dan tentunya tadi kami sepakat bahwa nanti ke depan bukan lagi pembiayaan oleh perbankan kepada BUMN-BUMN. Karena apa? ternyata kalau kita lihat angkanya BUMN-BUMN ini sudah betul-betul PMPK-nya sudah cukup tinggi. Sehingga inilah waktunya bahwa sektor swasta di-front line dan tentunya sektor swasta itu memang harus kita kasih guiden dan kita kasih insentif agar mereka masuk di berbagai sektor.

Ada 5 sektor yang kalau kita bicara dengan sektor keuangan swasta adalah perikanan, ini adalah sektor yang akan menjadi unggulan. Pariwisata tadi sudah disebut dan juga agri culture dari hulu sampai hilir mestinya ini akan menjadi prioritas kita. Jangan sampai nanti kita ekspor buah biasa kemudian harus kita olah dulu. Mainning juga akan menjadi unggulan tentunya tadi terima kasih Bapak Bambang bagaimana hilirisasi sektor mainning. Dan juga di samping itu juga sektor-sektor lain yang bagaimana nanti bisa kita berikan kepada para pengusaha sehingga nanti menyerap tenaga kerja dan mendukung ekspor kita. Nah, kami dari sektor keuangan tentunya akan memprioritaskan itu dalam rangka IPO maupun nanti dalam mengarahkan dalam pemberian kredit.

Lantas yang kedua, kita harus setiap usaha yang kita dorong kita harus memberikan multiplayer kepada UMKM. Ini adalah program-program *clustering* yang tentunya nanti harus ada Bapak angkat kepada perusahaan-perusahaan besar, baik perikanan maupun nanti adalah mainning maupun kelapa sawit dan juga agri culture lainnya, ini harus kita buat ya. Skim-skim ini akan kita buat menjadi satu integrasi antara UMKM dan juga eksportir. Dan ini semua akan menggunakan dana private apalagi kita akan mendorong adanya *foreign direct investment* untuk ini. Dan di samping itu UMKM ini selama ini sudah kita sediakan KUR yang jumlahnya cukup besar sehingga nanti...(suara tidak jelas)

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak saya minta maaf interupsi ini, ini kita belum ada bahan ini OJK, tolong masa cuma OJK yang tidak ada bahan yang lain ada.

#### **DEWAN KOMISIONER OJK:**

Ada sebenarnya Bapak Ketua, ini tinggal coba kita.

#### **KETUA RAPAT:**

Diberikan Pak, kepada kita.

## **DEWAN KOMISIONER OJK:**

Boleh kami lanjutkan Bapak Ketua.

Dan juga kami akan tetap mendorong adanya peran dari sektor mikro dalam hal ini. Berbagai program yang tentunya sudah kami lakukan bersama-sama dengan program dari Kementerian Keuangan, usaha mikro, mekar dan sebagainya.

### **Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia.**

Sehingga kami yakin tadi bahwa berbagai asumsi makro yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan. Kami dari intermediasi perbankan dapat yakin untuk bisa mendorong kredit tumbuh 12 sampai 14%. Dan juga DPK bisa tumbuh 10 sampai 12% di tahun 2020. Dan penghimpunan dan dari pasar modal bisa sampai 192 triliun. Dan juga kami lihat bahwa aset industri jasa keuangan nanti perbankan bisa tumbuh 13 sampai dengan 15%. Asuransi jiwa bisa tumbuh 10 sampai 11% dan asuransi umum 15 sampai 17%. Perusahaan pembiayaan 10 sampai 12%, dana pensiun dan juga DPPK PPMP 6 sampai 8%, dana pensiun DPPK PPIP adalah 10 sampai 11%. Dan dana pensiun DPLK sebesar 12 sampai 14%.

Demikian Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang kami muliakan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Kami persilakan dari BPS.

## **KEPALA BPS:**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

### **Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI.**

Pertama kami keluarga besar BPS menyampaikan selamat Idul Fitri 1440 Hجريah, mohon maaf atas segala salah dan khilaf.

Data-data yang dirilis BPS mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi sampai dengan target pembangunan sudah disampaikan secara rinci dan detail. Supaya tidak mengulang saya akan menyampaikan beberapa catatan tambahan saja. Yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019, tadi sudah disampaikan bahwa ekonomi kita tumbuh sebesar 5,07%.

Dengan memperhatikan perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian perang dagang, harga minyak yang belum stabil dan juga harga

komoditas yang fluktuasi bahkan cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi ini sebetulnya cukup menggembirakan. Pada periode yang sama ekonomi Tiongkok itu melambat dari 6,8% ke 6,4% demikian juga dengan perekonomian Singapura dan Korea Selatan. Meskipun demikian harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,07% ini agak di bawah ekspektasi karena ada beberapa kendala yang kita hadapi. Dari sisi produksi yang pertama adalah pertumbuhan industri pengolahan non migas yang agak melambat dari 5,08 ke 4,8%.

Kalau kita lihat sub sektornya industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh menggembirakan bisa dilihat bahwa ekspor tekstil dan pakaian jadi ke Amerika itu mengalami peningkatan yang signifikan. Kendalanya adalah terdapat pada pertumbuhan industri makanan dan minuman, meskipun masih tumbuh 6,77% itu tetapi itu melambat dari tahun lalu, penyebabnya adalah CPO. Jadi CPO kita mengalami kendala terlihat dari ekspor kita yang ke India dan Eropa mengalami penurunan.

Yang kedua adalah industri karet, barang karet dan plastic juga mengalami pertumbuhan negative dan satu lagi adalah industri batu bara dan pengilangan migas. Sektor kedua yang agak bermasalah adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sana bisa dilihat bahwa pertumbuhannya hanya 1,81% dengan catatan pertumbuhan ini melambat jauh karena ada pertumbuhan tanaman pangan yang tumbuh negative. Tetapi kalau kita lihat ke dalam sebetulnya ini bukan karena penurunan produksi tetapi lebih karena pergeseran musim panen. Jadi pada tahun 2018 puncak musim panennya terjadi di bulan Maret, kemudian dia drop di bulan April. Sementara pada tahun 2019 ini panennya terbagi rata antara Maret dan April sehingga dengan demikian pada triwulan II tahun 2019 bisa dipastikan bahwa pertumbuhan dari sektor pertanian akan jauh lebih bagus.

Dari sisi pengeluaran tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, konsumsi rumah tangga bagus, konsumsi Pemerintah juga tumbuh bagus. PMTB-nya agak melambat di 5,03% kalau kita lihat ke dalam jenis investasinya di sana terjadi karena untuk bangunan hanya tumbuh 5,48% sementara periode sebelumnya adalah 6,16%. Ini bisa ditandai dengan menurunnya penjualan semen, jadi penurunan investasi di sana selain karena perlambatan di bangunan juga ada perlambatan untuk kendaraan, satu lagi adalah untuk peralatan lainnya.

Satu kendala lagi yang kita hadapi adalah komponen ekspor dan impor. Harus diakui bahwa kita menghadapi tantangan yang besar untuk ekspor dan impor, di mana pada bulan April ini kita mengalami defisit neraca perdagangan -2,56 miliar US Dolar. Kalau kita lihat di sana sebetulnya ekspor batubara kita sisi volume masih mengalami peningkatan 11,6% tetapi nilainya turun lebih karena penurunan harga batubara yang turun tajam sampai mencapai 8%. Demikian juga dengan ekspor sawit kita dari sisi volume sebetulnya semakin naik 5% tetapi nilainya turun karena ada penurunan harga sawit.

Agak berbeda situasinya dengan karet dimana selain terjadi penurunan harga juga memang terjadi penurunan volume. Jadi dari komposisi ekspor dan impor ini diinternal kita masih mempunyai PR untuk melakukan diversifikasi produk dan pasar, kemudian menciptakan produk yang lebih kompetitif, sementara dari sisi eksternal kita dihadapkan pada perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas dan perang dagang.



Satu catatan lagi adalah bahwa kita mempunyai PR bagaimana meningkatkan ekspor kita dari provinsi lain. Sampai dengan saat ini 40% dari ekspor kita baru berasal dari 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Jadi ke depan kita masih harus berusaha keras bagaimana provinsi-provinsi lain juga bisa meningkatkan ekspor berdasarkan komoditas unggulan yang ada.

Yang kedua inflasi, inflasi tadi sudah disampaikan bahwa pada bulan Mei ini inflasinya 0,68%. Kalau kita lihat YOY 3,32% masih berada di bawah batas yang ditentukan dan terkendali. Banyak yang berpendapat bahwa inflasi Mei 0,68% ini agak tinggi kalau dibandingkan Mei tahun lalu tetapi sebetulnya kalau kita melihat perkembangan Ramadhan harusnya tidak dibandingkan secara luruh. Pada tahun 2017 Ramadhannya jauh di bulan keempat bulan Mei, pada tahun 2018 pertengahan bulan Mei, sementara pada tahun 2019 Ramadhannya jatuh di Awal Mei, sehingga kemungkinan besar puncak inflasi pada tahun 2019 adalah di bulan Mei, sementara nanti di bulan Juni kemungkinan besar inflasinya akan jauh lebih rendah dan itu bisa kita deteksi sampai minggu pertama bulan Juni di mana terjadi penurunan harga-harga yang cukup tajam dari bulan lalu.

Satu hal yang agak tidak biasa dari inflasi pada bulan Mei adalah sumbangan dari angkutan udara. Jadi kalau kita lihat paten dari tahun-tahun sebelumnya andil angkutan udara terhadap total inflasi biasanya hanya berkisar antara 2 sampai 4%, misalnya saja kalau kita lihat pada bulan Juni 2017 andil angkutan udara itu hanya 0,16 dari total inflasi 4,37 artinya sumbangannya adalah 3,7%. Tahun 2018 sumbangannya hanya 2,9% tetapi pada bulan Mei 2019 ini andil angkutan udara terhadap total inflasi adalah 0,3 terhadap 3,32 artinya bergerak naik tinggi sekali sekitar 9%. Jadi ini patut menjadi perhatian bisa dilihat bahwa jumlah penumpang angkutan udara selama beberapa bulan mengalami penurunan yang luar biasa. tentunya karena konsumen juga punya pilihan karena membaiknya transportasi darat.

Kemiskinan tadi sudah disampaikan oleh Menteri PPN, ada perbaikan di level nasional tetapi tantangan yang kita hadapi memang masih sama bahwa masih ada disparitas yang tinggi antara provinsi, kemudian kemiskinan masih terpusat di pedesaan dan mayoritas masih bekerja di sektor pertanian. Jadi untuk menumbuhkan pertumbuhan yang inklusif kita harus berupaya untuk menggerakkan sektor pertanian dengan melakukan pengolahan atau agro industry.

Dari sisi ketimpangan tadi sudah disampaikan ada penurunan yang menggembirakan. Kalau kita lihat dari kriteria world bank pun ketimpangan di Indonesia termasuk rendah karena di sana pendapatan yang diterima oleh penduduk 40% terbawah masih berada di atas 17%. Dari sisi angkatan kerja, kalau kita lihat perkembangan selama 5 tahun terakhir karakteristik penduduk bekerja juga menunjukkan perbaikan, misalnya saja penduduk yang bekerja pada tahun 2015 yang berpendidikan universitas dulu hanya 10,02% sekarang meningkat 12,61% sebaliknya yang berpendidikan rendah itu mengalami penurunan dari 54,6% ke 52,4%.

Terakhir adalah mengenai indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia kita menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan. Kalau kita lihat dari berbagai komponennya misalnya untuk komponen umur harapan hidup. Di sana berbagai indikator kesehatan menunjukkan perbaikan seperti menurunnya angka morbiditas, membaiknya rumah tangga yang menggunakan air bersih dan air layak dan juga jumlah rumah tangga yang memiliki sanitasi.

Satu persoalan yang mungkin perlu kita waspadai adalah masih tingginya presentase perkawinan dini di beberapa daerah. Jadi perkawinan dini ini bisa berdampak buruk pada umur harapan hidup, karena ketika terjadi perkawinan dini biasanya si ibu tidak siap secara mental dan ekonomi sehingga bisa menyebabkan tingkat kematian bayi yang tinggi dan akan berpengaruh kepada umur harapan hidup.

Sementara dari sisi pendidikan angka partisipasi sekolah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Yang perlu kita waspadai adalah curamnya penurunan angka partisipasi sekolah untuk mereka yang berumur antara 19 sampai dengan 24 tahun. dengan kata lain banyak anak-anak yang lulus SMA hanya satu diantara empat orang yang mampu meneruskan kuliah. Jadi itu merupakan tantangan kita ke depan.

Demikian Bapak yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

**Bapak-bapak dan Ibu sekalian.**

Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, kami persilakan dari Bapak-bapak dari Ibu-ibu sekalain untuk memperdalamnya. Saya persilakan Bapak Sarmuji.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Terima kasih Ketua.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,  
Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Bappenas, Kepala OJK, Gubernur BI dan  
Kepala BPS yang saya hormati beserta jajarannya.**

Ada beberapa hal yang barangkali perlu pendalaman. Pertama tentang kinerja perekonomian kita yang sampai sekarang tidak bisa beranjak dari sekitar 5,1% sampai 5,2%. Beberapa kesempatan dan di banyak sekali kesempatan baik Ibu Menteri Keuangan maupun Menteri yang lain selalu mengemukakan tentang perang dagang dengan Cina, perekonomian global yang tidak stabil dan sebagainya. Pada awalnya barangkali terdengar sebagai suatu fakta yang harus kita hadapi. Tetapi dengan segala permohonan maaf lama kelamaan apa yang sering diperdengarkan oleh Pemerintah bukan lagi sebagai fakta yang harus dihadapi akan tetapi lebih kepada fakta yang harus diterima. Yang itu yang saya khawatirkan adalah yang kedua, jangan sampai di dalam mentalitas kita semua baik Pemerintah maupun parlemen, kita

menganggap apa yang menjadi gejolak ekonomi global itu sesuatu yang harus kita terima bukan sesuatu yang harus kita hadapi.

Karena itu, saya selalu kepada kesempatan-kesempatan pembahasan seperti ini sebenarnya saya selalu mendorong supaya kita bisa tumbuh lebih tinggi minimal 1 strip, kalau normalnya kira-kira justifikasi profesionalnya 5,2 ya kita berharap bisa 5,3 dengan harapan ada insentif dari Pemerintah, dari kita semua untuk mencapai yang lebih tinggi. Itupun sebenarnya tidak cukup, itu hanya untuk memenuhi perekonomian kita hanya sekedar baik-baik saja, bukan perekonomian luar biasa, punya terobosan-terobosan sehingga kita tumbuh lebih tinggi.

Sebenarnya saya berharap pada kesempatan kali ini dan saya berharap juga bisa dijelaskan barangkali Pemerintah punya terobosan-terobosan apa yang kira-kira bisa kita dengar supaya perekonomian kita itu tumbuh lebih laju, lebih tinggi sehingga apa yang sering kita dengar sebagai middle income trade itu tidak benar-benar terjadi. Kita berharap terobosan-terobosan itu dan ini saya yakin sesuatu yang sangat sering juga disampaikan oleh Presiden bahwa kita harus punya terobosan-terobosan, kita harus punya lompatan-lompatan dan itu sebenarnya yang ingin saya dengar penjelasannya pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kami minta penjelasan kira-kira terobosan-terobosan apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk kita bisa melompat lebih tinggi.

Yang kedua, masih berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Di dalam perkiraan Bank Dunia dan IMF yang tertera dipenjelasan Menteri Keuangan, prediksi mereka perekonomian kita tumbuh 5,2% di 2020. Tidak seperti biasanya, biasanya Pemerintah selalu memasang *range* itu sesuai dengan prediksi internasional, baik IMF maupun Bank Dunia. Paling tidak prediksi Bank Dunia itu sekurang-kurangnya menjadi batas bawah *range* kita. Tapi diperkirakan di *range* yang ditawarkan oleh Pemerintah kali ini rupa-rupanya Pemerintah memasang target yang lebih tinggi, yaitu 5,3 sampai 5,6. Artinya, analisis lembaga internasional itu tidak berada pada *range* yang disampaikan oleh Pemerintah. Sebenarnya dalam konteks itu saya bergembira bahwa Pemerintah punya semangat, punya optimisme, tetapi sekali lagi tentu harus dikaitkan dengan terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi.

Yang ketiga, tentang kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah kita itu sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan Ketua kita Bang Mekeng pasti senang seandainya kesenjangan NTT itu dengan Jawa misalnya itu bisa lebih rapat. Tetapi fakta kesenjangan itu, itu berlangsung sejauh puluhan tahun juga dan sampai hari ini hampir-hampir tidak bergeser. Karena itu, saya ingin mendapatkan penjelasan terutama dari Bappenas kira-kira butuh berapa tahun atau berapa puluh tahun dengan perkiraan pergeseran berapa kesenjangan antar wilayah itu bisa dirapatkan, bisa diminimalkan. Karena kalau tidak kita ya akan ketemu lagi tahun depan dengan kontribusi Jawa dan Sumatera sebesar 80%, tahun depannya lagi juga 80% lagi. Nanti setelah tanpa terasa 10 tahun lagi juga akan seperti itu lagi. Maksud saya kita harus punya planning yang memadai dan cukup kira-kira biar Bapak JP ini juga tenang, supaya NTT itu kira-kira bisa lebih rapat dengan yang ada di pulau Jawa. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini.

Terakhir, tentang pendalaman pasar keuangan barangkali OJK juga bisa menyampaikan. Kita menyadari bahwa sumber keuangan kita untuk membangun itu terbatas, APBN kita terbatas, hutang juga tidak memungkinkan untuk terus menerus

ditumbuhkan lebih tinggi. Karena itu, perlu strategi pendalaman pasar keuangan, sama kira-kira dengan yang lain kira-kira strategi apa, terobosan-terobosan apa yang kita bisa membuat pasar keuangan kita itu lebih dalam sehingga bisa mendapatkan sumber keuangan yang lebih baik dan lebih segar tanpa ada beban-beban yang selama ini yang pada tahun-tahun kedepan akan menjadi beban bagi negara kita.

Barangkali itu Bapak Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Bapak Jon Erizal.

**F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E, M.B.A.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi XI DPR RI, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Bappenas, Bapak Pimpinan OJK dan Bapak Gubernur Bank Indonesia serta yang mendampingi.**

Saya senang hari ini lengkap Pak, sebagaimana yang kita sampaikan pada asumsi makro tahun lalu bahwa kalau bisa rapat seperti ini OJK harus hadir. Jadi bisa dijawab bahwa pertumbuhan kredit yang erat kaitannya dengan *growth* yang akan kita bicarakan itu ada korelasi dengan yang bisa jawab langsung. Terima kasih.

Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal, ada hal yang paling penting. Hari ini kita membahas asumsi yang berkaitan dengan APBN, namanya bukan dibikin ABPN itu filosofinya saya rasa dalam. Pasti yang dibahas soal pendapatan, tadi saya agak gembira Bappenas menyampaikan juga diujung bagaimana proses pendapatan dan Ibu Menteri juga sedikit mengupas tentang rencana pendapatan itu.

Ini saya selalu fokus kepada itu, karena setiap tahun kita temui selalu *shortage*, kecuali tahun yang lalu ada kita bisa katakan *win fall* target penerimaan kita bisa tercapai dan sebelum-sebelumnya selalu meleset. Ini karena saya melihat dari pengalaman itu kita kurang fokus menangani soal penerimaan ini. Kita juga bergembira Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah waktu itu sudah memutuskan satu Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dan itu juga kabarnya juga nanti tolong disampaikan juga sudah sampai dimana, karena banyak sekali pasal-pasal yang kita diskusikan yang punya kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan negara bukan pajak.

Jadi tadi disampaikan sekilas oleh Ibu Menteri tentang komposisi penerimaan kira-kira sekian persen dan ini sekian persen. Saya berharap itu bisa dijabarkan lebih detail agar kita tahu nanti, kalau kita mau menyetujui ini pertumbuhan menjadi 5,3

atau 5,6 sesuai harapan Bapak Sarmuji tadi, tentu ini didasari atas perolehan pendapatan yang akan kita capai. Jadi detail informasinya, kita yakin karena kalau tidak nanti seluruh KL-KL berpikir pada *spending site* karena mengejar konsumsi Pemerintah tadi untuk meningkatkan pertumbuhan.

Nah, kalau itu tinggi dan pendapatan tidak terkelola dengan baik atau katakanlah mungkin selama ini bahwa target-target pajak berapa, dulu berapa naikin 10% atau 15% saya rasa sudah tidak pada tempatnya lagi kita seperti itu. Kemudian PNBP seperti apa soal penerimaan itu, jadi kita benar-benar tahu bahwa nanti akan muncul hutang kalau penerimaannya tidak tercapai sebesar yang kita harapkan pertumbuhan tadi. Hutang itu sudah tidak jadi bahasan publik lagi karena sudah kita bahas disini. Kita sudah terbuka di publik, media lihat, oh iya inilah penerimaan yang akan kita capai, inilah belanja yang akan kita belanjakan. Nah, tentu disitu masuk asumsi-asumsi jika kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita atasi itu saya yakin publik pasti memakluminya. Jadi masalah hutang menjadi sesuatu yang tidak menakutkan lagi kalau kita menanganinya dari awal terbuka informasinya terhadap publik.

Kemudian ada yang menarik tadi yang berkaitan dengan fiskal. Kita banyak menjanjikan insentif fiskal terhadap investor yang masuk, ini sesuai harapan kita tadi kalau banyak investasi masuk tentu pertumbuhan ini akan terdongkrak. Tetapi selalu yang kita ekspose itu adalah yang baru yang akan masuk, sementara yang eksisting ini belum terdengar seperti apa, baik dari sisi insentif fiskal maupun dari sisi perbankan barangkali, OJK ini makanya perlu hadir juga. Relaksasi terhadap kondisi ekonomi yang seperti ini apa yang dilakukan OJK. Nah, kami juga ingin mendengar.

Kasihlah kalau pabrik-pabrik banyak tutup nanti, impor-impor pakaian jadi, impor-impor berbagai macam dari negara-negara yang memang punya harganya itu rendah akan mematikan banyak industry di kita. Nah, ini seperti apa kebijakan ini yang perlu kita dengarkan juga, bahwa nanti akan tumbuh kredit sekian persen untuk menunjang aktifitas ekonomi di Indonesia seperti itu dengan reason yang seperti apa. Ini juga menurut saya sangat penting.

Kemudian kita gembira karena tadi dibagi pada saat Ibu Menteri menyampaikan tentang asumsi. Kami diskusi, ini target pembangunan mana? Rupanya dijawab oleh Bapak Bambang sudah ada semua. Jadi syukur ini ada sinergi yang bagus, jadi sudah terjawab dan ini ada 4 target pembangunan ini kaitan ke BPS. 4 target pembangunan ini masuk dalam Undang-Undang APBN. Nah, kalau target ini tidak tercapai katakanlah tadi pembangunan yang dimaksud dengan Bapak Bambang tercapai semua, 4 target ini tidak tercapai melanggar Undang-Undang. ini sangat sensitive cuma belum ada yang mengangkat itu. Nah, ini harus kita waspada juga.

Nah, saya ingin mendorong agar BPS dalam pola membuat study atau membuat riset yang berkaitan dengan target-target ini betul-betul bisa dimengerti oleh masyarakat, oleh publik, terbuka, karena di lapangan masih sering kita dengar bahwa tim-tim yang diutus itu sering tim-tim konsultan, misalnya yang berkaitan dengan orang miskin, orang yang harusnya tidak dapat alokasi dana-dana kemiskinan tapi dia dapat itu terjadi. Nanti kita bisa tanya satu per satu di Anggota yang turun ke masyarakat. Nah, ini perlu ada transparansi, perlu ada mekanisme yang disampaikan. Jadi mekanisme ini diyakini oleh publik bila perlu ada juga pihak-pihak yang mengendorse bahwa itu pihak-pihak independent yang mengendorse bahwa sistem ini berjalan dengan baik. Jadi semua mengerti oh ini tercapai, sekarang begitu disebut misalnya

gini ratio sudah menurun di angka 0,38 tadi, itu bagaimana ngitungnya. Orang banyak bertanya apa iya menurun kok kami masih miskin. Nah ini yang perlu kita sampaikan gitu.

Nah kemudian tadi Bu Menteri menyampaikan juga dana alokasi ke daerah itumeningkat. Nah ini kemudian perlu satu transparansi yang berkaitan dengan formula dana bagi hasil daerah Ibu. Saya pernah dulu minta waktu sama Ibu Menteri untuk bertemu dengan kepala daerah tapi belum terlaksana, *Insya Allah* kedepan ini Bu bisa terlaksana. Dan mungkin juga pimpinan saya usul juga diundang kesini para kepala daerah yang merasa dana bagi hasilnya itu masih formulanya, mereka belum mengerti katakanlah, nah ini perlu kita dudukkan bersama karena ini menyangkut NKRI, karena sensitif sekali kalau mereka rasa perhitungannya tidak adil dan tidak merata ini kan akan terjadi gejolak-gejolak yang tidak kita inginkan. Jadi saya menyampaikan beberapa hal, demikian dulu Pak Pimpinan mudah-mudahan ini bermanfaat.

*Billahi Taufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Pak Refrizal.

**F-PKS (H. REFRIZAL):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Anggota Komisi XI, Bapak Ibu Komisi XI.  
Yang saya hormati Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala BPS dan seluruh jajaran yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya banggakan.**

Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin, *Taqobalallahu Mina Waminkum Taqobal ya Karim Minal Aidin Wal Faizin.*

Yang pertama saya mau ke tidak ke bukan ke makro dulu saya pingin ke mikro dulu, yaitu harga tiket pesawat yang mahal. Akupasi hotel sekarang ini Pak, dalam lebaran begini yang seharusnya padat ini kosong ini hanya dua puluh lima persen, dampaknya pendapatan, pendapatan Angkasa Pura juga jauh menurun. Dan juga bagasi berbayar, dan naiknya untuk angkutan udara juga termasuk bukan hanya tiket manusianya, barang jasanya juga naik. Ini memukul semua sektor, terutama ekonomi kecil. Nah ekonomi kecil ini tidak disinggung sedikitpun oleh termasuk oleh BPS. Apa ini ngga berdampak kepada inflasi kita Pak, padahal di daerah kita kalau lagi bicara inflasi di daerah Garuda kita sudah. Salah satunya yang dibicarakan masalah tiket

pesawat, apalagi di Sumatera Barat ekonomi besar tidak ada, ini kecil pengrajin makanan tempe apa namanya Rendang Padang, Kripik Balado dan lain-lainnya itu ngga dibawa pakai kontainer, tapi dibawanya pakai pesawat. Akan terpukul sekali ekonomi masyarakat disana dengan harga tiket mahal ini. Ini nda pernah dibicarakan.

Nah, ini saya kira ini masalah saya mulai dari sektor ekonomi mikro ini baru saya bicara sekarang makro ekonomi. Setahu saya Bu, Bu Menteri kita mau bicara APBN 2020. Anggaran Kementerian KL ini dipotong, banyak yang dipotong, termasuk anggaran DPR dipotong dari 5,7 triliun sekarang 3 triliun Pak dipotong, tinggal DPR ini tinggal dua, tinggal dua triliun, dua koma satu ya, ini tahu Bu, sehingga kami di DPR ngga bisa bahas anggaran. Mau taruh dimana gitu posisinya gitu. Nah ini yang saya pertanyakan kepada Ibu Menteri kenapa kalau ... tadi normal-normal semua gitu pertumbuhannya lima persen gitu ya, bagus-bagus inflasi dua sampai koma sampai empat kayaknya normal-normal negara gitu, tapi kenapa gitu, 2020 ini banyak sekali pemotongan untuk anggaran kementerian dan KL. Apa 2020 ini kita banyak bayar hutang, gitu ya. Nah ini perlu jawabannya Pak.

Dan juga kami sering ditanya tentang hutang kita ini, sudah berapa kita hutang sekarang, hutang negara kita berapa ini, bulan ini kita hutang berapa. Kita harus tahu ini, harus tahu kita ini, kita ditanya ini di masyarakat ini karena dia yang akan bayar nanti, sehingga naik tiket tadi Pak dikait-kaitkan dengan hutang kita ini, minimal hutang Garuda lah. Dulu Garuda mungkin beli Pesawat itu harganya mungkin dollarnya Cuma delapan ribu atau tujuh ribu, sekarang empat belas ribu, usulkan sekarang empat belas ribu sampai lima belas ribu,...(suara tidak jelas) berapa persen itu naiknya. Kita enak itu, mungkin ada kepentingan disini, eksportir memang enak kalau nilai tukar kita lemah itu eksportir senang, mungkin ada kepentingan tapi kita jangan menyenangkan eksportir saja. Negara ini bukan hanya diurus oleh eksportir saja, harus adil kita ngurus negara ini, antar importir eksportir kita ini, harus adil kita. Masa BI ngga bangga dengan nilai tukarnya yang bagus, kita bangga-banggakan kita sosialisasi Pak kami Komisi XI sosialisasi Bu rupiah kita sosialisasi. Harus kita bangga dengan tiket yang bagus dong, masa kita bangga nilai tukar kita menurun terus tiap tahun. Nah apalagi tadi Pak Wimbo mengatakan, ya ini dikuasai BUMN semua dari hulu sampai hilir sehingga UMKM kita usaha menengah kita dikuasai semua. Sampai ke daerah-daerah itu Pak tender-tender kecilpun dikuasai oleh BUMN, dimana masuknya, HIPMI kita tertutup juga jadinya, ngomel-ngomel datang sama kita di daerah itu bagaimana di DPR kok diam saja gitu, padahal saya ngga pernah diam itu ngomong terus itu, dianggap kita diam semua gitu oleh pengusaha kecil ini menengah ini. Bagaimana kita mau berpihaknya begitu.

Nah, ini yang saya kira Bu tolong dijelaskanlah kepada kita bagaimana, tapi kayaknya tadi normal-normal semua ya pertumbuhan lima ke atas gitu ya, walaupun dollar kita berkisar empat belas ribu tadi menurut inflasi, tapi kok begini, kok kenyataannya beda dengan yang disampaikan kepada kita itu, kenyataan lapangannya, karena kampanye sudah habis ini Pak, ini ngga kampanye lagi ini, ini apa adanya ini sekarang ini. Kalau dulu mungkin dianggap saya kampanye kalau sekarang ngga. Padahal saya dari dulu kampanye begini-begini saja begitu. Kampanye ngga kampanye kita begini terus menyampaikan membela orang kecil ini

sangat harus kita kedepankan. Saya waktu oposisi juga begitu Pak, waktu PKS ada dalam pemerintahan saya juga sikapnya sama, bukan karena saya oposisi sehingga beda sikapnya. Ini rakyat ini ngga kenal oposisi tidak oposisi. Perut ini ngga kenal oposisi tidak oposisi Pak, masyarakat banyak ini, tidak mengenal demikian. Nah ini tolong dijawab lah sama kita.

Nah, nah Bappenas ya, Bappenas Pak ini sekarang, mau pindah Ibu Kota Pak. Lagi begini kita mikirin pindah Ibu Kota Pak, coba bayangin Pak. Semua anggaran KL dipotong itu untuk mau pindah Ibu Kota, ya Pak. Kementerian dipotong untuk pindah Ibu Kota, pikirkan dulu ekonomi kita yang bagus baru kita, ngga gampang pindah Ibu Kota, besar itu biayanya, nda kecil biayanya. Pikirkan lah secara matang jangan ABS kepada Presiden begitu, Presiden gagah-gagahan ingin pindah, begitu jangan begitu. Bikin masukan yang benarlah kepada Presiden, jangan bikin Bapak Presiden senang, tapi kita kalau orang Betawi bilang *keblingsetan* anggaran kita nanti. Ini keadaan begini lagi sulit kita mau pindah Ibu Kota, gagah-gagahan begitu. Tolong dipikirkan Bappenas secara matang tentang pindah, saya mendukung Pak Wimbo kedepan harus kepada sektor swasta Pak, BUMN ini sudah gede diambil hulu sampai hilirnya, habis nanti. Jadi ekonomi kita ngga bergerak nanti. Nah saya khawatir begitu nanti, kita sudah sosialisasikan kemana-mana UMKM harusnya kita yang ngasih yang itu Bu yang Ibu sosialisasikan yang kita buka dulu di Bogor, Umi itu lah, pergi kami ke daerah dikasih dua juta, tiga juta, ya cicil tiap minggu, lama-lama modalnya kemakan sama dia, dua juta coba bayangin. Kalau kita pergi ke Jerman diketawain sama orang Jerman itu. Kami sosialisasi Undang-Undang tentang Usaha Kewirausahaan Nasional ketawa orang Jerman dengar kredit kita begitu segede gitu ketawa orang Jerman itu, nda ada Jerman begitu kredit untuk usaha tamat SMA saja ngga ada segitu, begitu. Nah ini yang saya kira harus kita berpihaklah kepada ekonomi menengah ke bawah ini.

Saya kita itu saja Bu tolong dijawab nanti berapa hutang kita kenapa apa tahun 2020 ini banyak hutang jatuh tempo dan bunganya harus kita bayar.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Pak Misbakhun.

**F-PG (MUKHAMAD MISBAKHUN):**

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Terima kasih Pak Ketua.



**Pimpinan yang saya hormati,  
Anggota Komisi XI yang saya hormati,  
Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner  
OJK dan Kepala BPS beserta jajaran yang saya hormati.**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swasti Astu,  
Namo Budaya.*

Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pembahasan RKP kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita tahun 2020 ini adalah tahun pertama periode keduanya Pak Presiden mudah-mudahan bisa lebih sinergi antara Pemerintah dengan DPR dan menghasilkan sesuatu yang lebih memberikan manfaat kepada rakyat kedepan. Pertama saya ingin menyampaikan Bu kepada Menteri Keuangan pertama saya ingin memastikan bahwa nanti pidato Presiden mengenai angka pertumbuhan itu tidak terkoreksi lagi di ruang sini, karena dua kali Presiden 2017 dan 2018 itu menyampaikan pidato nota keuangan dihadapan kita semua dan kemudian di ruangan ini dikoreksi oleh Menteri Keuangan. Tugas kita bersama dalam menjaga marwah isi pidato Presiden tersebut, tugas kita bersama. Menteri adalah pembantunya Presiden dan kita para politisi ini adalah para pendukungnya Presiden yang berada di posisi pemerintah. Tugas kita menjaga marwah Presiden ini. Apa yang menjadi omongan Presiden nilainya sangat tinggi mempunyai posisi yang sangat tinggi diucapkan sebagai sebuah pidato nota keuangan. Saya tidak ingin 2019 ini apa yang menjadi isi pidato Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi kemudian dikoreksi oleh Menteri Keuangan di ruangan ini ketika berpidato mengenai kerangka asumsi makro di pembahasan dalam rangka RAPBN nya.

Kemudian saya ada perlu mengkalibrasi beberapa data Bu. Volume PDB kita 14.837,4 triliun. Tadi beberapa kali Ibu menyampaikan soal tax ratio, soal tax ratio. Menjadi pertanyaan saya adalah tax ratio kita ini sebenarnya berapa. 2018 beberapa kali dikutip sekitar 11,6. Kalau saya baca dari statement Menteri Keuangan ya soal pengumuman penerimaan pajak pada tanggal 3 Januari 2019 total penerimaan pajak kita 1.315,9 triliun. Kalau kita bandingkan itu sekitar tentu dengan formulasi yang ada itu sekitar 8,8 persen tax ratio kita. Kalau dengan total penerimaan perpajakan itu sekitar total penerimaan perpajakannya 1.521,4 triliun itu sekitar 10,254 persen. Pak Hadiyanto ada disini kalau dikaitkan dengan PNBPN juga kita pada saat itu sudah menyepakati bahwa PNBPN tidak kita masukan dalam cara kita menghitung tax ratio, saya perlu mengkalibrasi ini Bu supaya apa yang disampaikan oleh pemerintah konfirm dengan apa yang data-data yang disajikan oleh pemerintah itu sendiri, saya ingin karena apa, saya tidak ingin ketika kita bicara tax ratio kemudian perbedaan persepsi tentang apa saja yang komponen yang masuk dan kemudian berapa valuasi nilai yang sebenarnya tentang tax ratio ini. Ini yang perlu kita kalibrasi bersama. Jangan sampai kemudian data-data itu mengalami simpang-siur yang seperti ini. Data

ini menjadi sangat serius, karena apa 0,1 itu adalah nilainya triliunan dalam ketika kita berbicara tentang penerimaan perpajakan.

Kemudian mengenai strategi pemerintah saya belum melihat tadi Ibu berbicara tentang beberapa kali nanti akan naik menjadi 12,4 dan sebagainya di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 akan menjadi berapa, bahkan Ibu sudah statement akan menjadi 13 koma berapa, tapi saya tidak pernah melihat sebuah disain besar pemerintah dalam rangka bagaimana tax ratio itu dicapai. Dan belum pernah dipresentasikan kepada kita di DPR ini. Seperti apa roadmap itu akan dicapai, karena apa undang-undangnya masih baru, objek pajaknya juga masih sama. Apalagi pada triwulan pertama pertumbuhan pajak kita ini hanya sekitar dibandingkan target penerimaan tahun 2018 Cuma sekitar tumbuh sekitar 1,82 persen. Ini adalah pertumbuhan target penerimaan yang sangat rendah sekali. Sementara kita pada saat yang sama mematok target pertumbuhan tax ratio yang begitu signifikan, tentunya kita harus mengkalibrasi kembali berapa tax ratio kita yang sebenarnya. Apalagi kita menghadapi Ibu baru pulang dari Fukuoka, isu utamanya itu adalah mengenai pajak mengenai digitalisasi. Kita tidak pernah berbicara bagaimana kedepan disain perpajakan kita, apakah perlu adanya objek pajak baru yang berkaitan dengan digitalisasi ini atau seperti apa disainya kita tidak pernah melihat sebuah roadmap. Reformasi perpajakan yang selalu Ibu sampaikan berkali-kali kita juga belum pernah menerima seperti apa reform yang sudah dilakukan baik itu dari sisi tatakelola organisasi tatakelola terhadap bagaimana dihandlingnya para pembayar pajak dan sebagainya. Lah ini yang kita belum ketemu. Karena apa, kalau kita perhatikan dari sisi penerimaan kita mengalami dua hal yang sangat kontradiktif.

Penerimaan pajak kita tidak optimal kita mengalami tekanan, tadi Ibu menyampaikan bahwa jumlah surat bunga kita sudah mencapai 5,84. Artinya apa, dari sisi biayanya kita naik tapi penerimaan kita tidak optimal. Tekanan itu dari dua arah, biaya yang naik dan penerimaan yang tidak optimal. Lah ini yang menimbulkan resiko yang sangat besar. Tentunya kalau kita bicara tentang tadi disampaikan tentang kredibilitas APBN ini kita bicara tentang kita sudah punya dari S and P (Standar And Poor) dan ...(suara tidak jelas) dan sebagainya semuanya memberikan investment grif kepada kita, tapi dampaknya terhadap surat hutang kita tidak ada. Kita justru makin mahal, bahkan lelang terakhir surat hutang kita Cuma beberapa yang terserap, tidak semuanya diserap oleh pasar. Lah ini yang harus disadarkan kepada kita semua disain ekonomi kita ini mau seperti apa terhadap APBN ini. Jangan sampai kemudian resikonya seperti 2017 yang lalu, penerimaan pajak tidak tercapai akhirnya yang dilakukan adalah pemotongan dan penundaan dana alokasi umum bahkan sampai dana alokasi khususnya. Lah memencet seperti APBN seperti kran inikan ini bukan sebuah teori yang ideal bagi APBN kita yang kita harus kita jaga.

Nah saya kepingin tahu strateginya apa, karena apa Ibu selalu berbicara tentang balance pembayar primer kita, payment kita, payments balance kita yang menuju ke arah positif. Tetapi pada saat yang sama itu juga tidak mengurangi dan tidak membawa dampak terhadap surat hutang kita yang semakin mahal. Artinya apa, pemerintah pada saat yang sama membayar beban bunga yang makin besar. Lah inilah yang kalau menurut saya negara sebesar Indonesia saya tidak melihat sebuah

kondisi, ini pertama kali sengaja kita ajak OJK karena rapat internal kita, kita sudah ingin mulai bahwa berapa sih peran sektor perbankan ketika Gubernur Bank Indonesia bicara tentang inflasi ketersediaan dana di sektor real itu berapa, konsolidasinya seperti apa sehingga kita perlu tahunya OJK ini sehingga mereka bersama-sama memikirkan bagaimana pertumbuhan.

Sama ketika Presiden berbicara tentang ekonomi kita perlu tumbuh 7%, saya tidak melihat sebuah pet diarahkan kesana. Bahkan untuk keluar dari middle income trade yang sudah dijelaskan bahwa kita perlu tumbuh enam persen saja kita tidak bisa melompat kesana. Tadi Pak Sarmuji juga sudah menyampaikan terobosan apa kita yang dilakukan untuk ke arah situ. Saya tidak melihat sebuah disain besar ide dan gagasan besar menuju kesana. Kita bisnis usual disini melakukannya semua. Nah inilah kalau menurut saya, saya perlu tadi dengan pertanyaan yang sama apa pemikiran-pemikiran besar sehingga apa yang menjadi tujuannya Presiden itu bisa dicapai. Presiden sudah menjanjikan kepada rakyat seperti ini. Apakah kemudian tadi ada target pembangunan gini ratio mengalami apakah cukup pertumbuhan yang seperti itu dengan pengeluaran yang sebesar itu pertumbuhan penurunan kenaikan IPM kita apakah cukup seperti itu. Pengangguran hanya cukup terserap seperti itu. Lah inilah yang harus kita pikirkan disain besarnya.

Kemudian berikutnya saya ijin menyampaikan soal ini Bu, perlunya Kementerian Keuangan untuk lebih berhati-hati, karena apa didalam disain APBN kita ini ada yang namanya audit BPK nya, dan kita harus berterimakasih kepada BPK karena BPK memberikan wajar tanpa pengecualian kepada pemerintah. Saya tahu sejarahnya kenapa itu seperti itu terjadi. Nah tapi tolong ada rekomendasi-rekomendasi mengenai ELMAN, bagaimana menjadi biaya modal dan kemudian menjadi biaya investasi ditaruh ...(suara tidak jelas) lainnya, kemudian bagaimana revaluasi aset yang dilakukan pemerintah itu harus benar-benar kredibel. Dan ini tolong benar-benar diperbaiki, dan jangan sampai kemudian kedepan ini menjadi sebuah konsiders yang harus dieksail hanya karena kita ingin mendapatkan WTP. Ini serius yang harus kita ingatkan kepada, karena apa tanggung jawab LKPP ini ada di Kementerian Keuangan. Ini sangat serius Bu karena apa kita berbicara apapun tapi kalau kemudian review dari lembaga seperti BPK itu memberikan sebuah penilaian yang berbeda terhadap kinerja pencapaian pemerintah.

Kemudian soal satu lagi yaitu saya soal selisih kurs. Pemerintah pada tahun 2018 mengalami kondisi selisih kurs win foul sehingga target penerimaan negaranya mencapai sekitar 102 persen, karena apa pada saat itu kita mematok selisih kurs 13.400 sementara realisasi kurs yang ada itu mengalami kenaikan dikisaran sekitar 14.000. Tentunya ini kita mengalami win foul dari PNBK karena harga komoditas dan kemudian patokan nilai kurs yang dibawah realisasi pasar sehingga kita mengalami win foul disana. Tapi situasi ini berbeda sekali dengan 2019, ketika kurs dipatok di APBN 15.000 tentunya ini menjadi masalah, karena apa tentu harga-harga yang menggunakan denominasi valuta asing tentu akan mengalami koreksi yang sangat signifikan, karena apa kurs pasarnya mengalami berada jauh dibawah dengan kurs yang ditetapkan oleh dalam asumsi makro pemerintah.

Nah saya ingin tahu seberapa besar exercisanya, anu sofoul yang disebabkan oleh tersebut oleh selisih kurs tersebut. Karena ini menjadi sebuah hitung-hitungan yang kita harus memitigasi resikonya, memitigasi resikonya karena apa nanti akan ada relai selisih kursnya karena rugi selisih kursnya tetapi yang realnya tidak seperti itu. Dan ini tentu juga akan berdampak terutama kepada penerimaan lifting Migas kita, PPH Migas kita yang didasarkan kepada harga Migas dunia yang menggunakan kurs Dollar, tentu juga terhadap kurs-kurs yang lain dimana kita menggunakan belanja, membayar surat hutang yang berdenominasi asing dan sebagainya, ini harus diukur benar. Saya ingin tahu dan diberikan jawaban yang memadai mengenai ini, karena apa resikonya adalah resiko penerimaan kita. Tentunya kalau resikonya terhadap penerimaan kita juga beresiko terhadap belanja kita yang menggunakan denominasi valuta asing, karena apa patokan harganya berbeda sekali antara asumsi makro dengan pasarnya. Nah, inilah kalau menurut saya, saya butuh penjelasan memadai dari pemerintah.

Kemudian mengenai Bank Indonesia saya mengucapkan terima kasih Pak, dan juga OJK dan kemudian Bappenas walaupun sangat terbatas banyak Anggota Komisi XI ini kepilih kembali Pak dalam Pemilu yang lalu. Saya perlu menyampaikan ini Pak karena saya ingin berterimakasih secara tulus dan sungguh-sungguh bahwa Bank Indonesia menjalin kerja sama yang sangat bagus. OJK juga, Bappenas juga walaupun terbatas, dan ini pertama kali Pak dalam sejarahnya Komisi XI yang tidak kepilih Cuma sebelas. Kalau tahun 2014 yang kepilih Cuma sebelas. Tahun ini yang tidak kepilih Cuma sebelas orang. Lah inilah mudah-mudahan sinergi ini kedepan terus dilanjutkan dan ditingkatkan tanpa kita mengganggu governernya, tanpa kita mengganggu governernya Pak. Karena apa, program-program kita sebagai wakil rakyat yang langsung bersentuhan dengan rakyat tidak mungkin ditopang oleh kita sebuah kerja individu tanpa ditopang oleh mitra kerja kita dengan menunjukkan bahwa kita mempunyai hubungan yang baik dan mitra kerja kita mempunyai kepedulian terhadap konstituen kita di daerah pemilihan kita.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

Ini partai pendukung rasanya oposisi, rasa oposisi. Kalau mau oposisi, oposisi, pendukung pendukung. Ya Pak ini Pak Harry.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Pimpinan yang saya hormati,  
Teman-teman sejawat Anggota Komisi XI yang saya hormati,  
Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri Bappenas, Gubernur BI dan Ketua Dewan  
OJK yang saya hormati beserta segenap seluruh jajaran.**

Pertama-tama tentunya saya juga ingin menyampaikan mohon maaf lahir batin ini masih suasana lebaran. Rupanya sudah banyak yang dikemukakan oleh teman-teman yang saya hormati tadi tapi ada beberapa hal yang mungkin saya perlu katakanlah memperkuat ya. Rupanya kita memasuki periode kedepan ini kebetulan setelah selesai Pemilu belum bisa memberikan sesuatu yang apa memberikan harapan lebih baik kedepan. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman yang terdahulu. Akhir-akhir ini kita seringkali bicara masalah bagaimana kita berupaya supaya terhindar dari *middle income trap*. Seperti ulasan atau paparan di halaman 7 dari Menteri Keuangan juga dinyatakan pertumbuhan rata-rata diatas enam persen dalam periode dua puluh sampai tiga puluh menjadi prasyarat untuk dapat keluar dari *middle income trap*. Tetapi tahun pertama kita memasuki periode 2020-2030 dengan pertumbuhan yang jauh dibawah prasyarat itu sendiri.

Ini jelas memberikan suatu apa ya harapan yang pesimistik menurut saya. Kalaupun selalu diutarakan karena dampak perang dagang dan lain sebagainya memang saya coba pelajari realisasi pertumbuhan kita sejak tahun 2012. Memang ada kecenderungan menurun. Saya menjadi bertanya-tanya apakah memang kita sudah mencapai puncak kinerja secara nasional selama periode hampir sepuluh terakhir ini, mudah-mudahan tidak. Tadi juga keluar satu terminologi bisnis usual. Saya khawatir memang kita secara nasional kita tidak mampu membuat terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan untuk mengejar pertumbuhan mencapai pada tingkat prasyarat supaya kita tidak terjebak pada pendapatan menengah tadi. Kekhawatiran saya itu dan ini juga ternyata disadari oleh pemerintah karena pada periode yang akan datang ini akan fokus kepada pembangunan sumberdaya manusia, apakah memang kapasitas kita hanya seperti ini. Kalau memang ini keadaannya memang demikian tentunya harapan-harapan yang memberikan gambaran lebih optimistik ini tidak akan mudah kita capai dikemudian hari. Dan mudah-mudahan saya juga keliru ya kalau tahun pertama saja kita sudah tidak mampu memenuhi prasyarat ini kira-kira bagaimana kedepan. Karena untuk meningkatkan seketika dari kisaran pertumbuhan lima katakanlah lima setengah persen meningkat menjadi diatas enam persen, ini juga pasti butuh sesuatu dan tidak mungkin dalam periode satu dua sampai tiga tahun kita bisa melompat mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali kita memang harus memiliki suatu upaya-upaya ekstra apakah itu terobosan atau, saya sendiri juga tidak punya konsep bagaimana mengatasi hal ini. Tetapi tentunya pemerintah punya kemampuan yang cukuplah. Untuk menganalisa sebetulnya sumber sebabnya apa. Jangan berulang kali kita mencari apa mencari kambing hitam hanya karena perang dagang. Perang dagang ini baru terjadi satu atau dua tahun terakhir ini, padahal trend penurunan

sudah terjadi sejak era tahun 2009 ya 2009 ini empat setengah persen pertumbuhan, mudah-mudahan data saya tidak keliru. 2010 agak meningkat signifikan 6%, 2011 masih 6,5%, 2012 mulai terjadi penurunan. 2013 makin turun, 2014 makin turun, dan terakhir 2018 outlook masih 5,2%. Mudah-mudahan kita bisa membalikan trend atau kecenderungan penurunan ini. Dan saya mungkin karena kita belum memasuki satu pembahasan yang lebih rinci kita belum bicara bagaimana strategi-strategi atau grand disain untuk kita menuju ke pertumbuhan yang lebih baik. Mungkin pada saatnya kita nanti akan bicara.

Kemudian yang kedua berbicara asumsi makro memang tidak mudah memperkirakan asumsi makro yang teliti ya. Tetapi saya melihat masih ada beberapa perbedaan, saya harapkan pandangan-pandangan atau masukan dari BI dan Kementerian Keuangan ini juga dilakukan *fine tuning* lah karena saya melihat prediksi BI ini lebih pesimistik dibandingkan Kementerian Keuangan. Contoh saya ambil contoh saja, BI memperkirakan pertumbuhannya 5,1 sampai 5,5 persen. Sementara Kementerian Keuangan 5,3 sampai 5,6 persen. Ini tentunya perlu dikaji sebelum dibahas lebih lanjut bersama kami Komisi XI tentunya antara BI dan pemerintah juga karena ada koordinasi tentunya perlu dilakukan *fine tuning*. Demikian juga untuk defisit, transaksi berjalan. BI perkiraannya jauh lebih pesimistik dibandingkan dengan perkiraan pemerintah, sehingga kami nanti Komisi XI bisa lebih fokus menuju pada *range* yang lebih akuratlah.

Sementara ari saya hanya itu jadi sebelum kita nanti bahas lebih lanjut harapan saya dilakukan *fine tuning* antara prediksi pemerintah dan BI. Kemudian juga walaupun memang tidak mudah coba diadakan kajian ulang lagi apakah memang kita sudah buntu tidak punya solusi untuk apa memiliki atau mentargetkan pertumbuhan yang lebih baik dari sekedar 5,6 persen ini, karena pemerintah sendiri sudah menyatakan prasyaratnya untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah ini harus diatas enam persen. Bagaimana bisa kita mencapai posisi itu kalau memang tahun pertama saja kita sudah jauh dibawah. Dan ini memberikan suatu apa ya kondisi yang kurang baik kita memasuki era pemerintahan baru ini.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG):**

*Wa'alaiku Salam.*

Ibu Elviana.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirohmanirrohim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Ibu Menteri Keuangan beserta Pak Wamen yang saya hormati beserta jajaran, Bapak Gubernur BI, Ketua OJK, Pak Menteri PPN/Bappenas dan Kepala BPS beserta seluruh jajaran yang saya hormati.**

Pertama saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin selamat Idul Fitri 1440 H. Yang kedua sebelum saya masuk ke ini saya juga memanfaatkan momen ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mitra dengan berbagai programnya *alkhamdulillah* kita terpilih kembali. OJK misalnya sosialisasi OJK membuat kita sering-sering mengumpulkan masyarakat, sosialisasi BI dan PSBI, khusus Bu Menteri Keuangan program PNM di Jambi membludak Bu. Ada satu kabupaten itu sampai puluhan ribu nasabahnya. Pinjam dua juta tanpa agunan angsuran lima puluh ribu. Sampai sekarang Bu orang bilang bagaimana cara pinjam duit Bank Bu Elviana itu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepan itu di muncul lagi di anggaran-anggaran berikutnya. BPS juga kita sering dipertemukan dengan para pengambil data, tenaga fiskal sekecamatan, kalau Bappenasnya juga bingung mungkin ada program yang bisa membuat kami bertemu dengan masyarakat.

Yang kedua, terima kasih atas paparan ini saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman saya disini. Besok kami mau rapat Kapoksi Insya Allah hari Senin Fraksi PPP sudah bisa memberikan persetujuan terhadap usulan ini. Dari ketiganya ini, baik Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan memaparkan asumsi makro, Bappenas sudah menyampaikan target pembangunan dengan segala angkanya. Cuma satu Ibu Menteri yang ingin saya tanyakan kalau ditanya oleh Poksi saya, postur anggaran 2020 itu apa bisa diperkirakan angkanya berapa triliun. Kalau 2019 inikan misalnya 2.400 triliun, kalau disinikan belum muncul angkanya seperti di halaman 22 itu masih persentase saja. Saya yakin itu nanti akan ditanya oleh teman-teman.

Yang kedua, target pembangunan kita berikan apresiasi sama Pemerintahan Jokowi yang sekarang pembangunan infrastruktur yang luar biasa sudah bisa membuat 25 provinsi di Indonesia pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan nasional. Ada 8 provinsi yang pertumbuhan ekonominya sepanjang 2015-2018 itu di bawah pertumbuhan nasional salah satunya ada provinsi Jambi, yang lain tetangganya Sumbar dan Riau, saya mencatat ada 5 provinsi itu di Sumatera. Apa penyebabnya? Karena memang infrastrukturnya semua didorong ke Indonesia timur. Lalu sampai lagi ke meja kami ini, RKP 2020 dari Menteri Bappenas, prioritas pembangunan Pulau Sumatera tidak muncul rencana pembangunan untuk infrastruktur ini.

Kemarin saya ikut rapat di Komisi V DPR RI, kebetulan saya sedang di BKO oleh Fraksi saya kesana. Di Menteri PUPR juga tidak muncul program-program infrastruktur untuk daerah-daerah di Sumatera ini. Saya pikir cukuplah satu periode kemarin Indonesia Timur, kami di barat agak diam. Karena angkanya jelas pertumbuhan ekonominya turun di bawah nasional yang segala macam itu. Malah ada jalan Muara Bungo, maaf ya mumpung bertemu saya sampaikan saja antara Muoro Bungo Jambi itu jalan benar-benar jalan nadinya Jambi. Itu selama 3 tahun terakhir

memang tidak pernah disentuh oleh APBN. Oleh sebab itu Bapak Menteri, saya mohon Bapak Menteri buka kembali lampiran ini, sample pembahasan Musrenbang apa benar Jambi hanya mengusulkan RKP dan Bandara Muoro Bungo. Rasanya tidak mungkin, tidak mungkin di Musrenbang kemarin tidak muncul, evakuasi Gunung Kerinci, jalan-jalan nasional yang selama 3 tahun tidak pernah diperbaiki.

Mungkin ada satu kabupaten yang mengusulkan RKP tapi jangan dong itu yang menjadi sample untuk Jambi, karena RKP itu tanpa masuk Musrenbang itu pasti dikeluarkan oleh Mendikbud, tanpa diminta pun jatah itu pasti dicairkan oleh Mendikbud.

Demikian Pimpinan, terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum salam.*

Bapak Johnny.

**F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Rekan-rekan Anggota yang kami hormati,  
Ibu Menteri, Bapak Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, Kepala BPS  
dan seluruh jajaran yang kami hormati.**

**Selamat sore.**

Yang pertama sudah banyak sekali disampaikan oleh rekan-rekan, saya barangkali yang ringan-ringannya saja. Ini pembahasan APBN kita kali ini memang unik ini karena ini pembahasan APBN untuk satu periode jangka menengah, awal periode jangka menengah berikutnya. Saya sendiri tidak tahu apakah ini saya berasumsikan bahwa ini *base line* APBN, karena memang kita membutuhkan visi dan misi Presiden terpilih nanti untuk diterjemahkan secara lebih teknis di RPJMN sebelum itu menjadi RAPBN tahunan kita. Walaupun saya bisa kira-kira Bappenas dalam menyusun itu juga sudah atau Pemerintah dalam menyusun itu sudah memperkirakan basisnya kira-kira kemana arahnya. Kita tunggu mudah-mudahan sebelum tanggal 28 Juni ini sudah jelas arahnya kemana sehingga kita bisa lebih akurat. Tapi kalau sampai perkiraan saya siapa yang akan memenangkannya nanti maka tentu *leading sector* di dalam APBN periode pertama Pemerintahan berikutnya mesti jelas. Kalau saja pasangan 01 yang akan menjadi Presiden maka visi dan misi utamanya adalah sumber daya manusia. Karena visi dan misi utamanya adalah manusia maka kita perlu tahu juga *leading sector* sumber daya manusia itu ada dimana. Dan bagaimana proyeksi tahunan APBN-nya untuk tekanan itu. Sambil yang kedua adalah melanjutkan program infrastruktur yang ada sampai dengan tuntas.



Saya kira dua tekanan itu perlu secara jelas nanti terdistribusi pada sektor apa saja dan sektor mana yang akan menjadi *leading sector*-nya. Itu barangkali pertanyaan yang pertama.

Yang kedua, saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja 5 tahun kabinet ini apabila nanti kita menyentuh GDP *income* per kapita kita 4.000 Dolar. Saya kira ini satu capaian yang besar, satu loncatan yang besar yang perlu kita berikan apresiasi dan ini hasil kinerja berbagai pihak, baik Pemerintah maupun rekan-rekan di DPR RI termasuk Komisi XI DPR RI yang secara konsisten memberikan pandangan-pandangan bahkan kritik-kritik.

Dalam kaitan dengan itu untuk tahun 2020 ini kalau saya tidak salah angka yang ada disini, yaitu disampaikan dibutuhkan atau kebutuhan investasi tahun 2020 dikisaran 5.800 triliun untuk mendorong pertumbuhan. Dan kebetulan OJK juga hadir saat ini maka ini barangkali PR besar yang harus disiapkan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh OJK untuk menjemput kebutuhan investasi sebesar itu. Kalau kita ingin benar-benar kita nanti progresif di dalam perekonomian tahun 2020 kita.

Saya juga ingin bertanya juga sebetulnya kepada Menteri Bappenas Bapak Profesor Bambang Brodjonegoro. Prioritas pembangunan wilayah sama seperti yang Ibu Evi sampaikan tadi, tekanan pembangunan wilayah sektor pariwisata titik tekanannya ada di 4 wilayah, di Toba, Bali, Mandalika, Labuan Bajo dan Borobudur Jogja, tekanannya pada 4 itu.

Nah, untuk keberhasilan kebutuhan dari awal selama 5 tahun kita bicarakan soal disparitas. Dan tadi rekan saya mengingatkan bagaimana disparitas wilayah spasial yang begitu tinggi dan gini ratio NTT juga kita tahu bersama, indeks pembangunan yang rendah, *income* per kapita yang rendah, gini ratio yang kelihatannya bagus ya tapi sebenarnya itu satu kelompok yang perlu asistensi negara yang luar biasa besarnya. Karena ini diletakkan disana, maka prioritas pembangunan wilayahnya ini perlu diterjemahkan secara lebih teknis di dalam buget dalam anggarannya.

Pengembangan pariwisata Labuan Bajo agar pariwisata itu betul-betul bisa maju, maka tidak bisa tidak infrastruktur wilayah sekitar Labuan Bajo perlu diselesaikan. Sepengetahuan saya dan saya kira sepengetahuan sangat diketahui oleh Ketua Komisi kita Bapak Melchias bahwa trans utara Flores hingga saat ini belum tuntas masih sekitar 100 km itu masih hutan, belum ada tapak jalannya sama sekali, 300 km sudah selesai dan itu menghubungkan sampai dengan titik sentralnya, yaitu Labuan Bajo.

Barangkali Bappenas bersama dengan PUPR perlu melihat ini agar investasi negara yang selama ini berpuluhan tahun sudah dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur itu tidak mubazir, karena saat ini setiap tahun ada maintenance jembatan yang rusak, ada maintenance jalan yang rusak, karena tidak terpakai sebagai akibat dari belum selesainya pembangunan itu. Nah, itu barangkali perlu perhatian agar prioritas pembangunan wilayah itu nanti betul-betul mencapai sasarannya.

Juga ini disampaikan yang perlu barangkali perhatian kita tadi digambarkan bahwa defisit neraca perdagangan kita tahun 2018 masih cukup besar sekitar 8 miliar Dolar dan di kuartal pertama 2019 sekitar 2 miliar Dolar itu besar, maka kami ingin mengingatkan bahwa di samping tentu ada importasi-importasi belanja modal

investasi atau bahan-bahan baku utama, juga akibat dari importasi kebutuhan minyak yang begitu besar.

Dalam kaitan dengan itu kami tentu minta supaya Pemerintah dalam hal ini Bepenas merancang program B20, B30 dan B100 road map-nya itu dengan benar dan diimplementasikan itu secara konsisten. Barangkali itu akan membantu untuk menekan atau memperkecil defisit neraca perdagangan kita.

Saya kira itu beberapa hal barangkali yang tadi belum disampaikan oleh rekan-rekan. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah yang telah bekerja keras sehingga capaian perekonomian kita sampai dengan saat ini sangat progresif dan positif khususnya terkait dengan *income* per kapita GDB yang maju pesat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Namun, disparitas itu tetap harus menjadi perhatian kita, pertumbuhan ekonomi kita pada level 5,3 sampai dengan 5,6 atau 5,1 sampai dengan 5,5 sebagaimana yang diasumsikan oleh Bank Indonesia itu harus titik tekanannya bukan pada tingkat pertumbuhannya saja akan tetapi kualitas pertumbuhannya menjadi perhatian kita.

Saya kira ini waktu yang tepat untuk kita menyusun dalam program-program yang lebih teknis terkait dengan pembangunan satu tahun berikutnya.

Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Yang terakhir Bapak Andreas.

#### **F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

#### **Ibu Menteri Keuangan yang saya hormati, Menteri Bappenas, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK beserta jajarannya.**

Memang kami sangat memahami dilemma yang dihadapi oleh Pemerintah, terutama tadi disampaikan oleh Pemerintah bahwa syarat untuk mencapai supaya tidak terjebak dalam *middle income trap* itu adalah pertumbuhan 6%. Tapi dalam situasi yang seperti demikian ini tentu Pemerintah telah melakukan beberapa opsi. Justru disinilah kami itu ingin disampaikan opsi-opsi tersebut, contohnya pertumbuhan ekonomi 5,3% disampaikan akan tergantung kepada investasi dan ekspor. Kita tahu bagaimana investasi bisa terjadi dengan *domestic demand* atau kebutuhan domestic yang seperti sekarang ini. Kalau mau mengepush di *domestic demand* berarti akan menempuh misalnya kebijakan fiskalnya diperpajakan misalnya, apakah akan diturunkan perpajakan, di satu sisi kita ingin meningkatkan *tax ratio*. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan Presiden juga mengatakan bukan hanya angka pertumbuhannya tapi juga kualitas pertumbuhannya. Tetapi di satu sisi tadi disampaikan bahwa untuk supaya tidak terjebak di dalam *middle income trap* minimum pertumbuhan 6% dan ini adalah pondasi tahun pertama. Sebetulnya kita tentunya dari segi kebijakan-kebijakan pilihan dan juga apa dukungan yang diperlukan oleh parlemen atau DPR RI ini saya

kira perlu disampaikan. Karena kalau tidak berarti kita nyerah dengan 5,3% dan kita akan masuk dalam *middle income trap*.

Jangan sampai kesimpulannya seperti itu tetapi kalau misalnya tahun pertama 5,3% apakah di tahun kedua kita bisa mencapai misalnya boleh saja 7% dan seterusnya, tapi apa syaratnya, apa prasyaratnya. Padahal di satu sisi kita tahu bahwa untuk mengembangkan ekspornya pun itu dengan kondisi sekarang apalagi semua mengkhawatirkan bukan hanya perang dagang tetapi yang banyak analisis mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Cina ini benar-benar melambat seperti tren ini maka tentu harga komoditas akan sangat turun, padahal di satu sisi kita sangat tergantung kepada harga komoditas. Di sisi lain kita lihat pertumbuhan atau tren industry manufacture kita juga trennya menurun, padahal kita tahu dari data penerimaan perpajakan kita itu porsi terbesarnya dari industry pengolahan.

Jadi ini sebetulnya saya apakah angka 5,3 ini hanya just number, tetapi justru eksplorasi dari pilihan-pilihan itu sangat penting. Inilah yang sebetulnya terus kita bilang efisiensi daripada *icon* kita apa yang bisa ini, apakah produktifitas sumber daya manusia yang akan dilakukan oleh Pemerintah, tapi kan memakan waktu. Di satu sisi problem besar kita sekarang adalah di dalam defisit neraca transaksi berjalan.

Kalau kita lihat komponennya pertama adalah dari transaksi barang. Kita tahu ekspor kita kan dengan adanya pertimbangan global akan menjadi masih kendala. Kemudian dari pendapatan primer, pendapatan primer kita tahu semakin tahun semakin besar. Apakah disini misalnya opsi ada top bimteks segala macam, kenapa kita tidak eksplorasi. Mungkin sudah tapi akibatnya dengan kondisi apa, butuh Undang-Undang seperti apa, ini sebenarnya kita inginkan. Pendapatan sekunder ini juga usulan dari Kadin untuk bagaimana meningkatkan reputasi kita. Sehingga sebetulnya opsi kita karena sekarang ini adalah opsinya hanya ditutup oleh namanya investasi *forto folio*, padahal harusnya kita dasarnya adalah investasi langsung. Tapi kalau investasi langsung apa *primuver*-nya? Tentu dengan ekonomi domestic yang besar mestinya....(suara tidak jelas)

#### **KETUA RAPAT:**

Pak, saya interupsi dulu.

Ibu Menteri kalau mau buka puasa sudah beduk katanya.

#### **F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):**

Jadi ini memang tidak akan bisa kita mencapai semuanya, di satu sisi kita mau menembus domestic demand, tax ratio-nya juga meningkat. Jadi ini adalah sebetulnya pilihan-pilihan yang harus kita eksplorasi supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Ini saya masih juga mencoba mengeksplorasi apa saja ruang untuk misalkan kita eksplorasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi moneter saya mengamati kebijakan Bank Indonesia yang terakhir-terakhir ini saya pikir juga cukup bagus terutama dengan penanganan operasi terbuka valasnya. Kemudian juga saya lihat disisi maintenance likuiditas itu dengan dual monetary operationnya menarik dari yang kelebihan likuiditas tapi mendistribusikan.

Tadi Bapak Fery juga mengatakan saya lihat di dalam presentasi itu espektasi daripada inflasinya juga rendah. Pertanyaannya adalah Bank Indonesia masih

menunggu apa untuk menurunkan tingkat bunga ini. Saya lihat kan inflasinya sekitar 3,5% ratetitas sekarang 6%, ini cukup lebar Ibu. Apalagi kita sudah dapat bonus SNP kita sudah naik. Jadi kita lihat kebijakan bunga di negara-negara sudah ini, jadi masih apakah ada perlu kita sehingga momentum untuk pertumbuhan ini bisa dilakukan.

Untuk OJK, saya lihat bahwa memang pertumbuhan kreditnya meningkat tapi tolong juga disampaikan tentang undisable loan-nya Pak, karena banyak juga yang ternyata itu baru peningkatan fasilitas tapi pencairannya juga angkanya katanya meningkat. Dan ini yang perlu kita waspadai adalah kelambatan dari pertumbuhan dana ini. Jadi apakah betul pertumbuhan dana ini karena tingkat bunga di perbankan yang kalah dengan surat utang negara. Kalau demikian kita tahu bahwa kebutuhan di dalam surat utang negara inikan juga akan meningkat di tahun ini.

Kemudian opsi pendanaan dari pasar modal pun saya kira juga apakah nanti dengan katakanlah gejolak global ini, itu arus balik ini akan ada dimana. Jadi menurut saya ini adalah sebetulnya tentu kita harus bertumpu bagaimana kita meningkatkan tabungan domestic kita. Saya terus terang saja waktu turun ke daerah-daerah cukup kaget karena banyak yang menjadi masih korban investasi bodong. Artinya, bahwa sebetulnya masih banyak dana-dana ini yang belum masuk ke dalam sistem keuangan kita. Inilah sebetulnya yang menjadi tantangan kita bagaimana kita bisa meningkatkan tabungan kita sehingga menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian kita.

Saya kira untuk Bappenas itu perlu dikembangkan masalah, saya sangat mendukung mungkin kerja sama dengan Bappenas mengenai interregional input out ini Pak. Kita sendiri misalnya di Malang Raya itu mendorong antara Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu dimana ada sinergitas di dalam pengembangan misalnya pariwisatanya itu. Jadi misalkan kalau katakanlah satu kabupaten mengembangkan wisata pantainya akan tetapi infrastrukturnya itu bisa dilakukan bersamaan. Untuk ini adalah perlu dipikirkan mungkin insentif untuk daerah yang melakukan ini Pak, sehingga saya kira ini adalah salah satu hal untuk mengoptimalkan istilahnya pemanfaatan dana kita.

Berikutnya yang saya amati adalah saya sangat mendukung mengenai kebijakan *spending better*. Dan saya meng-*highlight* hal yang mungkin perlu segera ditingkatkan, yaitu peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Kita tahu bahwa dana transfer daerah dan dana desa itu semakin tahun semakin meningkat. Tetapi kualitas dari pengelolaan dana tersebut di daerah itu menjadi hal yang sangat penting. Kami di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sedang melakukan kajian tentang hal ini dan nampak sekali salah satu contoh indikatornya adalah tentang pola belanja di daerah yang tidak berubah. Jadi kita punya data pola belanja Pemda itu menariknya adalah di setiap bulan Mei, Agustus dan Desember itu terlihat dari dana perbankan yang ada dari dana transfer daerah tersebut. Artinya, Januari sampai dengan Mei ini mereka tidak melakukan ini. Inikan sebetulnya kita kehilangan waktu yang sangat besar untuk mengoptimalkan penggunaan dana di daerah tersebut.

Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan kepada Menteri Keuangan kami sudah sampaikan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan mengenai dana BOS. Dana Bos ini memang dikucurkan 3 bulan tapi di akhir, jadi kalau misalnya untuk operasional Januari, Februari, Maret itu baru diakhir Maret. Sehingga guru-guru itu di Kabupaten Malang itu akhirnya harus ngutang untuk operasional. Ini saya sampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan agar tetap 3 bulan tapi kalau bisa di awal. Ini sangat

penting karena saya mendapat ini banyak keluhan dari guru dan dia mengatakan “Pak, inilah saya harus ngutang sebesar ini”. Jadi ini sebetulnya kalau menurut saya dana operasional perlu untuk memang diawal pencairannya.

Saya kira ini yang ingin kami sampaikan, satu hal yang mungkin untuk kebetulan ada KSKS tadi di dalam menyampaikan masalah stabilitas sistem keuangan. Dalam kondisi seperti saat ini, ini tadi kita hanya mengingatkan bahwa sangat tidak ada *luxurious* untuk terjadi suatu hal yang besar. Dalam hal ini kita tahu semua ada satu industry yang memang membutuhkan ini dan katanya masih tergantung pada satu RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah). Nah, ini mohon supaya RPP-nya ini segera bisa diselesaikan, karena kalau tidak ini memang terlalu lama dan ini akan berdampak kepada, jangan sampai berdampak kepada hal yang tidak kita inginkan.

Saya kira demikian, terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, selesai ya.

Saya sedikit saja Ibu Menteri, Bapak Menteri dan ini. Memang dari semua pemaparan dari Bapak-bapak dan Ibu Menteri ini ekonomi dunia menurun tapi kok Indonesia bisa naik itu pertanyaan saya agak menggelitik, dunia turun kita naik nanti dari mana naiknya kita ini. Sementara kalau saya lihat dari 2015 sampai sekarang *economy growth* kita inikan tidak besar naiknya dari 4,88 sekarang 5,07. Kalau kita mau ke 6% berapa banyak duit yang kita butuhkan, sementara tahun lalu forto folio yang keluar negeri yang keluar maupun investasi yang masuk kan tidak banyak ini, ini pekerjaan berat ini sebetulnya. Nah, ini kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah, paling tidak membalikkan dulu investasi yang kemarin pergi hampir 20 miliar Dolar, terus BKPM-nya juga tidak bisa kerja, tidak masukin duit sesuai dengan espektasi. Nah, ini bagaimana masukin ke dalam ini supaya APBN kita bisa jauh lebih realitis gitu.

Terus yang kedua buat Bapak Bambang, berapa besar pengaruh *economy growth* di daerah terhadap nasional. Karena kalau di daerahnya masih banyak yang miskin pasti di nasional pun tidak akan naik-naik. Jadi jangan sampai arah pembangunan kita salah, tidak pernah diselesaikan di daerah terus kita berharap *economy growth* di nasional naik, sementara tadi kita lihat dari grafik di atas yang tadi disampaikan antara daerah yang masih kurang mampu dengan yang masih mampu inikan lebih banyak yang di atas itu. Nah, ini mestinya sasaran pembangunannya itu harus lebih konkrit supaya terjadi *economy growth* yang lebih ini. Jadi kalau banyak daerah yang tidak keluar kemiskinan tidak akan keluar itu *economy growth* yang lebih bagus itu.

Untuk Bapak Fery, Bank Indonesia inikan sekarang harus bisa lebih aktif dalam menggairahkan pasar. Sekarang basisnya hanya SUN, SUN itu bisa dijadikan *secondary reserve* tapikan di pasar kita inikan bukan hanya SUN, ada corporate itu. Corporate kan pasti banyak yang bagus, banyak yang sedang dan banyak tidak bagus. Nah, kenapa tidak dibuat terobosan kalau kita ingin masuk uang dari luar tentunya korporasi ini juga menjadi salah satu instrument untuk uang masuk kesini, tapi orang kalau beli obligasi korporasi tidak ada *secondary* yang dia bisa inikan, dia tidak akan mau itu.

Nah, ini juga Bank Indonesia juga harus membuat satu terobosan yang tidak *business as usual* supaya ada aliran uang masuk disini. OJK bilang tadikan *loan to deposit ratio* 94%, bisa mau dibikin sampai 150% tapi nanti andalannya hanya pada *coor money sorterm funding* membiayai *longterm project* itu sangat berbahaya buat ekonomi kita. Nah, inikan harus ada terobosan antara BI dan OJK membuat satu terobosan supaya orang bergairan dari luar negeri masuk bukan hanya kepada SUN. Kepada SUN itukan negara yang utang, tetapi korporasi untuk bisa bergerak itukan perlu juga ada dukungan dari Pemerintah maupun Bank Indonesia dan OJK.

Nah, ini yang diharapkan dari kita semua disini harus satu terobosan supaya *economy growth* kita bisa 6%. Saya tidak tahu sekarang GDP berapa sekarang, kalau naikin 1% itukan butuh duit 1.500 triliun, dari mana 1.500 triliun itu. Itukan yang perlu dipikirkan kalau kita mau supaya jadi 6% harus ada uang fresh masuk ke dalam sistem, baik itu melalui program Pemerintah ataupun program-program proyek-proyek dari swasta supaya *economy growth* itu bisa 6%. Kalau tidak kita hanya mengandalkan penerimaan pajak terus utang kita sudah mulai naik 30% tidak akan berani. Makanya tiba-tiba DPR RI dipotong dia punya anggaran yang terlalu besar, inikan repot ini, lucu ini. Baru DPR RI nanti kita lihat dari departemen-departemen dipotong yang mana, ini mungkin karena supaya jangan utangnya kebanyakan jadi belanjanya dikecilin.

Jadi saya ingin minta penjelasan daripada Pemerintah mungkin tidak hari ini, hari Senin kita rapat lagi supaya Pemerintah bisa memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman.

#### **F-PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):**

Pimpinan, sedikit.  
Terima kasih Pimpinan.

#### **Ibu Menteri dan Bapak-bapak sekalian.**

Saya ada tambahan sedikit Pak, sependapat sekali saya sama Ketua bahwa gairah pasar uang ini harus betul-betul ditingkatkan, harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan.

Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Bappenas itu sudah menarik Pak, cuma tolong pada saat jawaban itu ada *road map* atau target yang mau dicapai karena seperti Pina itu seperti apa. Jangan project-project yang kita masuk itu mungkin tidak terlalu berminat di pasar dan seterusnya. Maksud saya perlu digambarkan secara detail, ini salah satu membuat pasar uang bergairah. Tentu surat-surat berharga pasar uang lainnya ini juga harus bagaimana BI dan OJK mendongkrak naik supaya pasar berminat kesana.

Kemudian tadi menarik yang disampaikan oleh Bapak Bambang, bahwa kalau mau tumbuh di atas 5% kita harus ada investasi 7%. Nah, saya mau berikan catatan betul ini investasi yang tumbuh ini investasi yang mana gitu, karena ada investasi yang dulu saya ingat Bapak Boediono pernah menyampaikan bahwa kualitas investasi yang masuk Indonesia itu lemah. Karena apa? karena bentuknya selalu sumber daya alam, kemudian hal-hal yang sifatnya mengeruk kekayaan Indonesia di bawah perijinan. 7%

itu kalau bisa manufaktur seperti yang disampaikan tadi ini juga dijelaskan dalam jawaban tentunya Pak.

Kemudian tadi yang menarik lagi hilirisasi, saya ambil contoh sawit ini. Ini tidak akan bisa berkembang atau tumbuh kalau tidak ada keberpihakan. Saya sudah mencatat betul Pak, contoh sawit. Sekarang kan teknologi minyak sawit kan rendah Pak, murah investasinya. Masalah mereka mau dijual kemana, mau lawan raksasa-raksasa yang telah lebih dahulu masuk pasar tidak mungkin. Jadi saya usulkan kepada Pemerintah pasanya dibagi lah, bagi kepada masyarakat atau pendatang baru yang betul-betul tumbuh dari masyarakat dikasih segmen-segmen tertentu, kalau di market mereka tidak akan bisa hidup. Jadi saya rasa ini penting.

Kemudian untuk Bank Indonesia Bapak Fery sedikit, tolong *range*-nya jangan terlalu luas kalau bikin ini, supaya kami punya keyakinan bahwa analisa Bank Indonesia memang tepat. Ini terlalu *range*-nya 5,1 sampai 5,5 mungkin kalau mau 5,3 sampai 5,5, atau 5,1 sampai 5,3. Kalau terlalu luas itu kita juga bingung, sementara yang punya data kan Bank Indonesia sangat kuat.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Silakan.

#### **F-P. NASDEM (JOHNNY G. PLATE, S.E.):**

Yang lupa sedikit tadi, sedikit saja.

#### **Ibu Menteri dan para mitra kerja sekalian.**

Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa jangan sampai masalah utang ini menghantui kita, membuat rakyat menjadi takut, karena Pemerintah pasti yang membuat tata kelola utang itu dengan baik dan bijaksana. Seperti dokumen-dokumen yang disampaikan ini ukuran-ukurannya, jangan sampai menakutkan. Saya atau kami beberapa orang tahun lalu mengunjungi London Stock Exchange dan mereka menyambut Komodo Bond kita untuk masuk pertama di global bond yang sangat menarik. Dan saat itu mereka menyampaikan kapan bond-bond berikutnya dari Indonesia untuk masuk ke London Stock Exchange atau di pasar-pasar keuangan global berikutnya. Apakah nanti ada Kalimutu Bond, Toba Bond, Borobudur Bond atau apa saja dalam rangka mendukung program infrastruktur non APBN dimaksud. Jangan sampai kita di buat takut seolah-olah utang ini setan gundul yang akan merusak Indonesia. Tetapi mengelola utang kita dengan penuh tanggungjawab untuk manfaat kepentingan bangsa dan negara.

Negara-negara dan bangsa lain pun masuk di pasar-pasar global dan mampu mengelolannya dengan baik. Kita ini dihantui dengan narasi-narasi yang tidak menguntungkan perekonomian kita, tapi saya mengingatkan pada saat kita mengelola program infrastruktur non APBN tolong itu dilakukan dengan secara akuntabel dan dengan penuh tanggungjawab.

Terima kasih.

## **F-PG (MUKHAMAD MISBAKHUN):**

Ketua, saya ingin menambahkan sedikit soal utang Pak.

Sedikit saja Bapak Ketua.

Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Johnny tadi. Ketika narasi soal utang ini harus dijelaskan, bahwa penambahan utang itu juga bertambah dengan jumlah aset Pemerintah, jumlah aset barang milik negara yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Baik itu barang dalam bentuk asetnya BUMN maupun barang milik negara. Dan ini sering tidak paralel, orang hanya bicara tentang penambahan utang tetapi tidak pernah kemudian mereka secara equal dan secara *fear* berbicara tentang jumlah barang milik negara itu juga bertambah.

BUMN bertambah utang juga bertambah barang aset milik BUMN. Nah, ini yang harus secara *fear* kita sampaikan kepada publik bahwa utang itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak punya utang, sepanjang utang itu dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan pembangunan untuk sektor yang produktif dan memberikan dampak yang positif bagaimana Pemerintah mengelolanya, saya yakin isu soal utang ini bisa kita jelaskan dengan baik *clear* kepada publik.

Perlu kalau menurut saya peran juru bicara atau PR Pemerintah lebih kuat menjelaskan ini kepada masyarakat. Bagaimana kemudian soal utang ini seakan-akan isunya selalu dikaitkan bahwa yang membayar begitu Pemerintah nambah utang selalu dikatakan jumlah rakyat Indonesia tiap pribadinya menambah sekitar 16 juta, 18 juta dan sebagainya. Pemerintah tidak akan pernah meminta hal seperti itu secara individual, karena ada mekanisme bagaimana Pemerintah membayar, memungut uang melalui pajak dan sebagainya. Dan isu-isu seperti ini harus kita luruskan di depan rakyat Indonesia.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Ini baru pendukung Pemerintah, tadi Menteri Keuangan lagi puasa dimarah-marahin, sudah buka puasa sekarang.

## **Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.**

Hari Senin kita rapat lagi jam 13.00 WIB untuk mendengarkan jawaban dari Pemerintah dan kita ambil keputusan. Saya rasa ini saja yang bisa kami sampaikan.

Silakan Ibu Menteri Keuangan *closing remarks*.

## **MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):**

Baik, Pimpinan.

Saya mohon maaf tadi awal alpha untuk tidak menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, *minal aidzin wal'faidzin* karena saya sudah di Paripurna dan Banggar jadi saya agak slip tadi.



Tadi masukan-masukan yang sangat bagus dari seluruh Anggota Komisi XI DPR RI, tentu akan menjadi catatan kita untuk kita respon pada hari Senin. Dan saya juga memahami ini adalah pertemuan Rapat Kerja sudah begitu lama DPR RI dengan kami Pemerintah tidak melakukan Rapat Kerja. Jadi saya pasti juga merasakan banyak sekali isu-isu yang ingin dibahas.

Tadi juga disampaikan oleh Bapak Andreas, Bapak Johnny, bahwa 2020 ini adalah situasi biasanya di dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perencanaan Pembangunan itu awal dari suatu Pemerintahan sesudah Pemilu memang di-*treat* sebagai *baseline*. Jadi memang kami ini di dalam posisi mempersiapkan ini dengan tetap memberikan signal positif dan optimis. Namun kita juga mencoba untuk menjaga etika politik bahwa ini adalah *baseline*.

Namun tentu dengan Bergeraknya waktu dan ini juga konsultasikan terus dengan Presiden dalam sidang kabinet apalagi pada saat di tengah-tengah Pemilu itu ada memiliki sensitifitas yang sangat tinggi. Padahal kami harus menuliskan PPKR dan harus menjadi awal. Jadi memang ini adalah suasana yang mungkin perlu untuk dilihat dalam konteksnya.

Namun, masukan-masukan tadi mengenai bagaimana kita bisa mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, kualitasnya lebih baik, merupakan satu point yang sangat-sangat valid. Jadi kami akan mencoba untuk meresponnya pada hari Senin Pimpinan, karena memang pada saat ini kita bicara mengenai asumsi makro dan masih dalam *range*. Dan tentu kita juga membahasnya dengan Badan Anggaran dan disitu pun kita juga akan mendapatkan masukan-masukan. Jadi kami akan mencoba untuk terus secara harmonis menjaga hubungan Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran dan bagaimana kita bisa menyampaikan pemikiran mengenai *policy* yang baik.

Mungkin itu Pimpinan, terima kasih sekali lagi atas masukan yang sudah kami catat semuanya. Dan kami akan mempersiapkan untuk bisa membahasnya pada hari Senin, di mana kita akan mencoba untuk menyampaikan pemikiran yang lebih komprehensif meskipun ini masih di dalam tahap camp PPKF. Nanti tentu Presiden yang akan menyampaikan Nota Keuangan pada bulan Agustus yang ini akan menyangkut seluruh tadi beberapa permintaan sebetulnya akan ada di dalam Nota Keuangan tersebut.

Demikian Pimpinan dari kami, terima kasih sekali lagi.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikum Salam.*

**Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.**

Saya rasa bisa kita akhiri Rapat Kerja pada sore hari ini dengan keputusan kita akan mendengarkan jawaban dari Pemerintah pada hari Senin jam 13.00 WIB.

Sekian dan terima kasih dengan ini rapat saya tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.13 WIB)**

**Jakarta, 13 Juni 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**ttd**

**Drs. Urip Soediarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**